ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, INVESTASI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH-DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 2011-2017

SKRIPSI

Oleh:

ISZUR MAULANA SABILILAH RAMADHAN

NIM : G71216042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	: Iszur Maulana Sabilillah Ramadhan
NIM	: G71216042
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi	: Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah-Daerah Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2017.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Iszur Maulana S. R.

G71216042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Iszur Maulana Sabililah Ramadhan, NIM G71216042 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,8 November 2020

Pembimbing,

Lilik Rahmawati, S.Si., M.EI

NIP. 198106062009012008

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Iszur Maulana Sabililah Ramadhan NIM, G71216042 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Falkultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 10 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Elik Rahmawati, M.EI

NIP. 198106062009012008

Penguji II,

DR. H. Abdul Hakim, SE., M.EI

NIP. 197008042005011003

Penguji III,

Hj. Nurlailah, SE., MM.

NIP. 196205222000032001

Penguji IV,

Abdullah Kafabih, S.EI, M.SE

NIP. 199108072019031006

Surabaya, 26 Desember 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ISZUR MAULANA SABILILAH RAMADHAN
NIM : G71216042
Fakultas/Jurusan : FEBI / ILMU EKONOMI
E-mail address : iszurm@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, INVESTASI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH-DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 2011-2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Desember 2020

Penulis

(Iszur Maulana S. R.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah-Daerah di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2017" ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh secara simultan dan parsial antara Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber data berasal dari Badan Statistik Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda menggunakan bantuan program Eviews11 dengan data panel.

Secara simultan hasil dari variabel indeks pembangunan manusia, investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini karena dapat dibuktikan dengan hasil pengujian nilai F hitung sebesar 2,635 dengan probabilitas variabel indeks pembangunan manusia, investasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000 sehingga lebih kecil dari pada nilai signifikasi sebesar 0,05 (5%) sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Dan secara parsial variabel IPM terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur berpengaruh positif dan signifikan, karena hasil pengujian sebesar 0,0000, dan nilai t-Statistik sebesar 14.54922 dengan koefisien bertanda positif. Berbeda dengan variabel investasi terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur berpengaruh negatif dan signifikan, karena hasil pengujian sebesar 0.0066 dan nilait-Statistik sebesar -1.619237 dengan koefisien bertanda negatif. Sedangkan Variabel pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur berpengaruh positif dan signifikan karena nilai sebesar 0.0112 dan nilai t-statistik sebesar 1.593844 dengan koefisien bertanda positif.

Walaupun tingkat harapan hidup di provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan, komponen-komponen lain juga perlu dicermati oleh pemerintahan daerah. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain indeks kesehatan, indeks pendidikan,dan indeks daya beli, untuk itu butuh adanya kebijakan maupun program yang menunjang kenaikan Indeks Pembangunan Manusia. Tidak hanya upaya peningkatan pendampingan dan evaluasi program perlu ditinjau ulang agar program pemerintah tepat pada sasara. Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebaiknya di fokuskan pada kabupaten-kabupaten yang masi tertinggal atau yang belum berkembang untuk mengurangi ketimpangan ditribusi pendapatan.

Kata Kunci: **Indeks Pembanguan Manusia, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Rumusan Masalah** 7
- **C. Tujuan Penelitian** 8
- **D. Manfaat Penelitian** 8

BAB II **9**
TINJAUAN PUSTAKA **9**
- **A. Landasan Teori** 9
  1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 9
  2. Investasi 12
  3. Pertumbuhan Ekonomi 18
  4. Ketimpangan Pendapatan 22
- **B. Penelitian Terdahulu** 26
- **C. Kerangka Konseptual** 29
- **D. Hipotesis Penelitian** 30

BAB III **31**
METODE PENELITIAN **31**
- **A. Jenis Penelitian** 31
- **B. Waktu Dan Tempat Penelitian** 31
- **C. Jenis Dan Sumber Data** 32
- **D. Variabel Penelitian** 32
- **E. Definisi Operasional** 33
  1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Investasi 33
3. Pertumbuhan Ekonomi 33
4. Ketimpangan Pendapatan 34
F. Data Dan Sumber Data 34
1. Data 34
2. Sumber Data 34
G. Teknik Pengumpulan Data 35
H. Teknik Analisis Data 35
BAB IV 41
HASIL PENELIIAN 41
A. Gambar Umum Kondisi Daerah 41
1. Kondisi Geografis 41
2. Demografis Penduduk 42
3. Kondisi Rasio Gini 44
4. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia 47
5. Kondisi Investasi 50
6. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi 54
B. Analisis Data 59
1. Regresi Linier Berganda 59
2. Uji Asumsi Klasik 60
3. Uji Statistik 64
4. Analisis Determinasi (R2) 67
BAB V 65
PEMBAHASAN 65
A. Pengaruh Variabel Bebas Secara Simultan Terhadap Variabel Terikat 65
B. Pengaruh Variabel Bebas Secara Parsial Terhadap Variabel Terikat 66
1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah-Daerah Provinsi Jawa Timur 2011-2017 66
2. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah-Daerah Provinsi Jawa Timur 2011-2017 70
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah-Daerah Provinsi Jawa Timur 2011-2017 73
BAB VI 77
PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA **78**
Lampiran 1 Data Penelitian **81**
Lampiran 2 Kartu Konsultasi Skripsi **85**
Lampiran 3 Biodata Penulis **86**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Gini Rasio Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2017..... 5

Tabel 4.1 Gini Rasio Provinsi Jawa Timur 2011-2017 Menurut Kab/Kota 40

Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2011-2017 Menurut Kab/Kota 50

Tabel 4.3 Investasi Provinsi Jawa Timur 2011-2017 Menurut Kab/Kota 52

Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2011-2017 Menurut Kab/Kota 53

Tabel 4.5 Hasil Stastistik 54

Tabel 4.6 Hasil Uji Hetorekedastisitas..... 56

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi 57

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial 58

Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan..... 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Lorenz..... 21

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 27

Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Timur..... 36

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas..... 54

Gambar 4.3 Hasil Uji Multikolineritas 55

Gambar 5.1 Grafik IPM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2017 65

Gambar 5.2 Grafik Investasi Jawa Timur Tahun 2011-2017..... 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan jika dilihat secara kondisi geografisnya. Dimana terdiri dari 34 Provinsi, hal ini menjadikan Negara Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda di tiap daerah. Tidak hanya itu, sumber daya alam (SDA) yang beranekaragam tersebar di seluruh daerah dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing[1]. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah untuk bisa melakukan pemerataan pembangunan di semua daerah yang pada dasarnya memiliki karakterisitik, kekayaan alam, modal manusia, dsb yang tentu berbeda-beda tiap daerah.

Pembangunan ekonomi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian namun pada kenyataan nya tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Beberapa masalah tersebut memang sudah menjadi fokus perhatian pemerintah sejak dulu namun masih belum bisa teratasi sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau seluruh negara berkembang[2]. Salah satu langkah pemerintah untuk menyikapi perbedaan sumber daya antar daerah adalah dengan menetapkan kebijakan pembangunan yang berorientasi daerah, dengan tujuan agar pemerintah daerah

[1] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat*, (Yogyakarta: Badan Penerbit STIE YKPN, 1999), hal. 108
[2] Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 423

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih fokus dalam menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Hal tersebut dilakukan pemerintah dengan maksud agar pertumbuhan ekonomi di tiap daerah dapat berkembang karena kebijakannya telah disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi dimana PDRB mengalami peningkatan. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dikatakan tumbuh apabila terjadi kenaikan output perkapita[3].

Beberapa ahli ekonomi menyatakan bahwa pembangunan terutama dalam hal ekonomi merupakan pertumbuhan dengan disertai perubahan struktur dan bentuk kegiatan ekonomi. Ada tiga unsur pembangunan ekonomi, yaitu: 1) Terdapat unsur investasi baru dalam proses perubahan secara terus menerus dalam jangka waktu panjang, 2) Ada upaya dalam peningkatan pendapatan perkapita, serta 3) Adanya upaya dalam peningkatan pendapatan perkapita harus dalam kurun jangka panjang[4].

Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi merupakan target yang harus dicapai oleh pemerintah. Untuk mencapai target tersebut maka dibutuhkan adanya investasi yang sesuai. Menurut teori Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa dicapai melalui penambahan

[3] Surya Dewi Rustariyuni, *Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004-2012*, Dalam Jurnal Piramida, Vol. 10, No.1, hlm. 51
[4] Suryana, *Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000) hlm. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi. Investasi dapat memberikan angin segar bagi pertumbuhan ekonomi baik investasi dalam negeri maupun luar negeri.[5]

Faktor utama ketertarikan investor untuk menanamkan modal, salah satunya adalah iklim investasi atau daya saing investasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Semakin tinggi daya saingnya maka akan semakin besar pula peluang yang didapatkan untuk memperoleh dana investasi. Namun perlu diketahui bahwa daya saing tiap daerah tidak dapat terbentuk dengan sendirinya, melainkan dibutuhkan suatu perencanaan dan strategi dari pemerintah daerah untuk menarik hati para investor agar mau berinvestasi atau menanamkan modal. Ketertarikan para investor ini juga didasari dari beberapa faktor, salah satunya yaitu pembangunan manusia di daerah tersebut.Hal tersebut tentu sangat diperhatikan oleh para investor agar dapat bersinergi dalam membentuk hubungan kemitraan untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Suatu daerah dapat dikatakan tumbuh dengan baik jika pertumbuhan ekonominya dapat benar-benar dirasakan efeknya terhadap kehidupan seluruh masyarakat. Tolak ukur yang kerap digunakan adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia di daerah tersebut. Karena itu, pemerintah terus mengupayakan agar daerah nya memiliki modal manusia atau IPM yang

[5] Komang Agus Triasta Outra, Luh Putu Aswitari, "Kebutuhan Investasi Sektor Basis Industri Per Kecamatan di Kabupaten Gianyar dalam Rangka One Village One Product", Dalam *E-Journal*: EP Unud, Vol. 2, No.12, 2013), hlm.555-556

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi, dengan begitu maka seharusnya daerah tersebut tingkat kemiskinannya juga rendah.[6]

Walaupun tidak dapat mengukur semua hasil dimensi manusia, IPM merupakan indikator komposit tunggal. IPM dinilai mampu mengukur tiga aspek pokok pembangunan yang dinilai mampu menggambarkan keadaan kemampuan dasar (*basic capabilities*). Ketiga kemampuan tersebut yaitu angka harapan hidup, pengetahuan dan keterampilan serta kemudahan akses terhadap kebutuhan untuk hidup yang layak.[7] Rendah maupun tingginya tingkat IPM akan memberikan dampak terhadap tingkat produktivitas masyarakat, jika IPM di suatu daerah rendah, maka tingkat produktivitas masyarakat daerah tersebut juga akan rendah dan akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat setempat. Sebaliknya, jika IPM di daerah tersebut mengalami peningkatan, itu artinya produktivitas nya juga akan semakin naik, hal ini yang menyebabkan pendapatan masyarakat juga akan naik.[8] Sehingga rendahnya IPM di suatu daerah adalah memperlihatkan bahwa kurangnya pemerataan pembangunan antar wilayah yang pada akhirnya menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, dan indeks pembangunan manusia adalah hal penting

---

[6] Alhudori, *Pemgaruh IPM dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi, (Jurnal of Economics and Business*, Vol. 1, No. 1, 2017)

[7] Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, Hariyadi, Yuni Sudarwati, *Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018) hlm. 25

[8] Diah Pradnyadewi dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja, "Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali", Dalam *E-Journal* Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 6, No. 2, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengurangi ketimpangan pendapatan daerah-daerah. Ketiga hal tersebut mempunyai pengaruh yang dapat menentukan akan seberapa besar tingkat ketimpangan pendapatan di daerah yang bersangkutan. Pada setiap wilayah, ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan dari proses pembangunan. Hal ini memang sangat rentan terjadi akibat adanya perbedaan karakteristik wilayah, sumberdaya atau kekayaan alam, dan infrastruktur di masing-masing daerah. Kondisi ini juga terjadi di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi di daerah perkotaan.

Gini Rasio merupakan nilai yang digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat ketimpangan pendapatam suatu wilayah. Berdasarkan kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai Gini Ratio yakni antara 0-1. Semakin tinngi nilainya maka kesenjangan distribusi pendapatam di wilayah tersebut juga semakin tinggi. Begitu sebaliknya, semakin rendah nilai gini rasionya maka tingkat kesenjangan pendapatannya juga rendah atau bisa diartikan bahwa tingkat pemerataan pendapatannya sudah cukup baik. Berikut tabel keadaan perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Timur :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Perkembangan *Gini Ratio* Provinsi Jawa TimurTahun 2011-2017

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2011	0,358	0,298	0,351
2012	0,384	0,268	0,362
2013	0,386	0,309	0,368
2014	0,428	0,339	0,403
2015	0,428	0,327	0,403
2016	0,433	0,313	0,402
2017	0,442	0,317	0,415

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dari tabel di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012-2017 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2012, nilai Gini Ratio Jawa Timur hanya sebesar 0,351, namun di tahun 2017 nilai Gini Ratio mencapai angka 0,415. Berdasarkan daerah tempat tinggal, nilai Gini Ratio di daerah perkotaan terendah yaitu 0,358 di tahun 2011 dan tertinggi yaitu mencapai 0,442 di tahun 2017. Sedangkan di daerah pedesaan, nilai Gini Ratio terendah yaitu pada tahun 2011 yang hanya sebesar 0,298 dan tertinggi di tahun 2017 yang mencapai angka 0,317.

Dari tabel diatas juga dapat kita lihat bahwa angka Gini Rasio pedesaan di Jawa Timur dari tahun 2011-2017 lebih rendah daripada daerah perkotaan. Hal ini tentu banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti kualitas sumber daya manusia, kegiatan perekonomian, kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih terpusat di daerah-daerah perkotaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketidakmerataan distribusi pendapatan yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan antar daerah menjadi salah satu masalah yang serius sebagai akibat adanya sebuah pembangunan ekonomi. Terjadinya hal tersebut dilator belakangi oleh keanekaragaman budaya, sumber daya, karakteristik masyarakat, dll di masing-masing daerah. Masalah yang timbul akibat belum meratanya pembangunan tidak bisa hanya diatasi oleh target pertumbuhan ekonomi yang sudah tercapai, karena terdapat pertumbuhan beberapa wilayah yang cepat, tetapi pertumbuhan di beberapa wilayah yang lain justru mengalami perlambatan. Penyebabnya bisa dikarenakan kurangnya sumber daya yang dimiliki pada tiap daerah yang tidak mengalami perkembangan dan kemajuan yang sama. Selain itu, besarnya suntikan dana investasi yang tidak merata di beberapa daerah, rendahnya tingkat produktivitas antar daerah, modal manusia yang beda antar wilayah, akan menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan antar wilayah atau daerah.[9] Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah-Daerah Di Provinsi Jawa Timur 2011 – 2017".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah variabel indeks pembangunan manusia (IPM), investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap variabel

[9] Muhammad Haris Hidayat, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012*, (Skripsi – Universitas Diponegoro, 2014), hlm. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017?

2. Apakah variabel indeks pembangunan manusia (IPM), investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap variabel ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi apakah ada pengaruh secara simultan antara variabel indeks pembangunan manusia (IPM), investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017.
2. Untuk mengidentifikasi apakah ada pengaruh secara parsial antara variabel indeks pembangunan manusia (IPM), investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk penulis, sebagai sarana penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir juga untuk menambah keilmuan guna meningkatkan kualitas diri.
2. Manfaat bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai sarana evaluasi dan membuat suatu kebijakan untuk mengatasi ketimpangan yang ada.
3. Manfaat bagi semua pihak adalah sebagai bahan rujukan atau informasi dan referensi ketika mengadakan penelitian dengan topik terkait di masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep Indeks Pembangunan Manusia pertama kali dipublikasikan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) melalui *Human Development Report* pada tahun 1996.[10]

a. Definisi Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan alat sebagai tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan angka harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan serta kesejahteraan hidup diseluruh negara di dunia. Karena situasi baru pada tahun 2000 tentang *depletion* sumber daya alam, eksploitasi lingkungan, berubahnya iklim, perlindungan sosial, ketahanan energi dan pangan, dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin. Dimulai dari tahun 2015 seluruh pembangunan mengacu pada konsepan baru yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lebih sering disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SGDs). Dalam konsepan ini terdapat tujuan mengenai dengan pembangunan manusia yang menjadi hal penting pada perencanaan dan strategi pembangunan berkelanjutan.[11]

---

[10] Mohammad Bhakti Setiawan, Abdul Hakim, *Indeks Pembangunan Manusia*, Dalam Jurnal Economica, Vol. 9, No. 1, 2013, 19

[11] Badan Pusat Statistik, 2017, diakses melalui website www.bps.go.id pada tanggal 23November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu tolak ukur untuk mengukur tercapainya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat indeks pembangunan manusia di suatu wilayah atau daerah.

b. Indikator Pembangunan Manusia :

Indeks pembangunan manusia sendiri dinilai dari tiga indikator, yakni angka harapan hidup/lamanya hidup, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Melalui tiga indikator tersebut dapat mewujudkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi.[12]

1) Angka Harapan Hidup/Lamanya Hidup

Dimensi umur panjang dan sehat mencerminkan aspek kesehatan. Indikator yang digunakan untuk mendeteksi capaian dari dimensi umur panjang dan sehat adalah angka harapan hidup (*life expectancy*).

2) Tingkat Pendidikan

Dimensi pengetahuan menggambarkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk dewasa, yakni penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Untuk mengukurnya, digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.

3) Standar Hidup Yang Layak

Standar hidup yang layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya perekonomian. Untuk mengukur standar hidup yang

[12] Denni Sulistio Mirza, *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009,* (EDAJ, Vol. 1, No.1, 2012), hlm. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layak ini, BPS menggunakan rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan.[13]

c. Perhitungan IPM

Perhitungan IPM yakni meliputi perhitungan angka harapan hidup, tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, dan kesejahteraan hidup. IPM juga bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan suatu daerah. BPS telah menggolongkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur menjadi empat kelompok, diantaranya jika IPM > 80 = sangat tinggi, antara 70 < IPM < 80 = tinggi, 60 < IPM < 70 = sedang, dan jika IPM < 60 = rendah. Dari ketiga komponen dapat dihitung menggunakan metode sederhana yakni :

$$\text{IPM} = 1/3\ (IndeksX1 + IndeksX2 + IndeksX3)$$

Keterangan :

X1 = Tingkat Pendidikan

X2 = Kesehatan

X3 = Pendapatan rill per kapita

Dalam Indeks Pembangunan Manusia, kesenjangan lebih jelas terlihat menggunakan indikator pendapatan daripada menggunakan indikator pembangunan lainnya.[14] Manfaat dari IPM tersendiri adalah Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup

[13] Rarasati, M., *Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005-2011*, (Tesis – Universitas Sebelas Maret, 2012), hlm. 10
[14] Michael Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 85-86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia (masyarakat/penduduk), menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, dan bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).[15]

2. Investasi

a. Definisi Investasi

Istilah Investasi dari bahasa latin yaitu investire (memakai), sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*. Investasi dapat didefinisakan sebuah kegiatan untuk penaikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal yang nantinya barang modal ini akan menghasilkan.

Teori Harrod-Domar adalah perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek yang dianggap kurang lengkap. Ketidak lengkapan itu karena tidak menyinggung persoalan mengatasi masalah ekonomi makro jangka panjang. Dimana teori Keynes mengabaikan peranan pembentukan modal sebagai pengeluaran yang mempertinggi kesanggupan sektor perusahaan untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan masyarakat, analisis Keynes lebih ditekankan kepada masalah kekurangan pengeluaran masyarakat, karena ia menganggap tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh tingkat pengeluaran seluruh masyarakat bukan kepada kesanggupan barang-barang modal untuk memproduksi barang-barang.

[15] Www.dpr.go.id, diakses pada tanggal 22 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori pertumbuhan Ekonomi dari Harrod–Domar memperhatikan kedua fungsi dalam pembentukan modal tersebut dalam kegiatan ekonomi, menerangkan bahwa pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.

b. Teori Investasi

Menurut Todaro (2000:137-138), "investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa". Pembentukan modal dapat memperbesar kapasitas produksi dan menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, hal ini memperluas kesempatan kerja.

Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan yang sejalan dengan teori diatas, seperti penelitian dari Adrian sutawijaya (2010) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Ekspor Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006". Penelitian ini menggunakan meotde Ordinary Least Squares (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya secara bersama-sama, variabel investasi swasta, investasi pemerintah, ekspor migas, ekspor non migas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan, untuk variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi swasta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arwiny Fajriah Anwar (2011) melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia Periode 2000-2009". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana luar negeri yang dikelola oleh pemerintah Indonesia yaitu utang luar negeri dan penanaman modal asing berdasarkan Produk Domestik Bruto Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel utang luar negeri memiliki pengaruh yang negatif terhadap PDB, sedangkan penanaman modal asing memiliki pengaruh positif terhadap PDB Indonesia.

I Gusti Ayu Putri Wahyuni dkk (2014) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2000-2012. Penelitian ini menggunakan model analisis jalur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi juga memiliki pengaruh positif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sedangkan investasi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan melalui petumbuhan ekonomi.

Dewi Maharani (2016) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sumatera Utara". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 3 variabel yaitu investasi domestik, investasi asing, dan tenaga kerja yang mempengaruhi PDRB di Sumatera Utara mulai dari tahun 2003 sampai 2014. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi Fixed Effect. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Investasi, tenaga kerja, memiliki pengaruh positif terhadap PDRB di Sumatera Utara.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Investasi ialah penempatan modal di badan usaha dengan cara membeli saham atau obligasi dari badan usaha tersebut[16]. Sedangkan investasi adalah penanaman uang atau modal dari suatu perusahaan atau projek untuk tujuan memperoleh keuntungan[17]. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2007, Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik Investasi di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

---

[16] Tim penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan keempat)*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1993), hlm. 895

[17] Ibid, hlm 337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Investasi sangat penting artinya ditengah-tengah keterbatasan pemerintah dalam membiayai segala jenis kebutuhan pembangunan, untuk pemerintah merangsang partisipasi sektor swasta untuk menyukseskan program pembangunan nasional. Investasi menjadi salah satu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional. Investasi asing dan dalam negeri sangatlah dibutuhkan oleh bangsa Indonesia demi kemajuan negara Indonesia. Investasi dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Investasi Dalam Negeri

Undang-Undang no. 25 tahun 2007 pasal 1 memberikan definisi tentang penanaman modal dalam negeri atau investasi dalam negeri yaitu kegiatan menanam modal untuk Melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Investor dalam negeri adalah penanam modal dalam negeri bisa perseorangan warga negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Investasi dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk investasi langsung *(Domestic direct investment*) yang penanaman modal oleh pemilik modal sendiri. Dan ada pula dalam bentuk intestasi tidak langsung (*Domestic indirect*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investment) yang penanamannya melalui pembelian obligasi, surat-surat pembendaharaan negara, dan saham-saham lainnya yang dikeluarkan perusahan, dan tabungan atau deposito yang berjangka waktu sekurang-kurangnya dalam satu tahun.

2) Investasi Asing

Investasi asing merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir pada sector swasta yang bisa melalui investasi langsung atau pembanguna perusahaan multinasional. Pada Undang-Undang pasar 1 UU 25/2007 menyebutkan bahwa penanaman modal asing atau investasi asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Investasi asing dapat berbentuk investasi langsung (direct investment) yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang akan dilaksanakan, sehingga investasi langsung dapat diperjual belikan di pasar uang (money market), pasar modal dan pasar turunan. Sedangkan untuk investasi asing yang berbentuk tidak langsung merupakan investasi bersifat keuangan yang dilakukan di luar negeri. Penanam modal memebeli uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau ekuitas dengan harapan mendapatkan manfaat finasial dari investasi tersebut. Bentuk lain dari investasi tidak langsung adalah investasi portofolio dengan pembelian obligasi oleh perusahaan asing, pembelian saham tanpa control manajemen di perusahaan investasi.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kajian perekonomian, apabila suatu daerah dikatakan "tumbuh" jika ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa, meningkatnya pendapatan nasional atau Produk Domestik Regional Bruto, dan semakin besarnya peluang pekerjaan sehingga tenaga kerja di daerah tersebut terserap dengan maksimal.

a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Menurut Todaro (2000:20), pertumbuhan ekonomi ialah proses dimana produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil mengalami kenaikan. Perekonomian dikatakan tumbuh dan berkembang apabila terjadi pertambahan *output* riil, sedangkan pembangunan ekonomi akan menunjukkan struktur *output* dan alokasi *input* pada berbagai sektor perekonomian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Teori Pertumbuhan

Dalam buku An Iqury into The Nature and Causes of The Wealth of Nation (1776), Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith dapat dibedakan dalam dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu :

1) Pertumbuhan Output Total

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga, yaitu sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya insani/jumlah penduduk, dan stok barang modal yang ada.

2) Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten atau tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan angkatan kerja yang bekerja dari masyarakat.[18]

c. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Todaro (2000:136) juga mengatakan terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara yaitu : 1) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah tenaga kerja; 2) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik,

[18] Rahmi Fuji Astuti Harahap, *Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*, (Skripsi – Universitas Diponegoro Semarang, 2014), hlm. 19-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan modal atau sumber daya manusia; dan 3) Kemajuan teknologi dianggap sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting sehingga bisa diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (a) kemajuan teknologi bersifat netral; (b) kemajuan teknologi hemat tenaga kerja; (c) kemajuan teknologi hemat modal.

Sejalan dengan Todaro, Kuznets dalam Arsyad (2010:277) menjelaskan pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi kemampuan suatu negara atau daerah untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, system kelembagaan, serta penyesuaian ideologi tiap-tiap individu.

d. Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi karena pembangunan ekonomi selalu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Biasanya diketahui dengan meningkatnya PDB (produk domestik bruto) atau PDRB (produk domestik regional bruto) yang ditandai peningkatan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari proses naiknya pendapatan perkapita dalam jangka panjang, tidak memperhatikan pertambahan penduduk, tidak pemperhatikan pemerataan pendapatan, dan setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi bisa menggunakan rumus:

$$r_{t-1t} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

r_{t-1t} = tingkat pertumbuhan ekonomi

PDB_t = produk domestik bruto tahun yang dihitung

PDB_{t-1}= produk domestik bruto tahun sebelumnya

Pendapatan nasional dapat dijadikan tolak ukur seberapa tinggi tingkat perekonomian yang dicapai di daerah tersebut dalam satu tahun. Dalam suatu daerah baik itu provinsi atau kota pendapatan nasional dinamakan dengan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Salah satu kegunaan PDRB adalah untuk melihat kemampuan suatu daerah tersebut dalam mengelola suatu perekonomian. Jika dilihat dari kegunaannya maka PDRB setiap daerah akan berbeda hasilnya tergantung pada sumber daya dan faktor yang mempengaruhi produksi di daerah tersebut.[19] Untuk dapat mengetahui seberapa besar PDRB maka ada beberapa perhitungan:

1) Perhitungan pendekatan pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran tiap-tiap pelaku ekonomi dengan rumus, Y=C+I+G+(X-M). Komponen tersebut yaitu: 1) C yang berati pengeluaran konsumsi rumah tangga beserta lembaga swasta. 2) I yang berarti Investasi. 3) G atau Goverment yang artinya pengeluaran pemerintah. 4) X-M yang artinya hasil ekspor dikurangi dengan impor atau ekspor netto.
2) Perhitungan pendekatan pendapatan dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat

[19] BPS, Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha‖, https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html, diakses pada 09-11-2-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksi kepada rumah tangga produsen dengan rumus, $Y= R+W+I+\pi$. Komponen tersebut yaitu: 1) R ialah sewa tanah. 2) W adalah upah atau gaji. 3) I yang artinya pendapatan bunga. Dan 4) π adalah laba atau keuntungan.

3) Perhitungan pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau menjumlahkan seluruh nilai tambah semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan dengan rumus $Y=P_1.Q_1+. . .+P_n.Q_n$. Komponen P ialah harga barang dan jasa, sedangkan Q ialah jumlah barang dan jasa.

4. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pembangunan antar merupakan aspek yang umum terjadi yang disebabkan karena beberapa kondisi daerah yang berbeda satu sama lain. Hal ini berdampak pada proses pembangunan menjadi berbeda.[20]

a. Definisi Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah.[21]

[20] Lailatul Fitriyah dan Lucky Rachmawati, "*Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Gerbang Kertosusilo Provinsi Jawa Timur"*, Dalam Jurnal UNESA, hlm. 6

[21]Istiqomah Sapti Wulandari, *Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Magelang Tahun 2004-2013,* Dalam Jurnal Universitas Tidar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Indikator Ketimpangan Pendapatan

1) Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan nasional dalam suatu negara atau daerah adalah indeks gini (gini ratio). Rasio gini adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derahat ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk.

2) Indikator Ketimpangan Menurut Bank Dunia

Bank dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi dari 40% kelompok penduduk termiskin terhadap total pengeluarannya. Dalam hal ini, pendapatan yang diterima masyarakat didekati oleh pengeluaran yang dilakukan masyarakat. Argumennya bahwa pengeluaran menunjukkan pendapatan.

c. Perhitungan Ketimpangan Pendapatan

Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Bedasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Perhatikan gambar berikut :

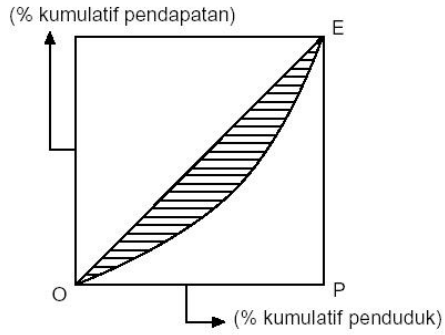

Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Dari gambar kurva Lorenz dapat dilihat pada sumbu horisontal menggambarkan prosentase kumulatif penduduk, sedangkan pada sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing prosentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut "garis kemerataan sempurna". Karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan prosentase penduduk yang sama dengan prosentase penerimaan pendapatan. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu.[22]

Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa mayoritas daerah-daerah nya merupakan daerah yang pertumbuhannya relative lambat. Dan sebagian besar daerah pada provinsi ini tergolong dalam kategori daerah yang relatif tertinggal, dari 33 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Jawa Timurada sekitar 23 Kabupaten/Kota yang tergolong tertinggal.

Michael Todaro dan Adam Smith berpendapat bahwa Koefisien Gini dapat digunakan sebagai alat ukur terjadinya ketimpangan di suatu daerah. Ukuran yang digunakan dalam Koefisien Gini dalam ukuran ketimpangan agregat yang dimulai antara nol yang mengibaratkan pemerataan sempurna hingga satu yang mengindikasikan ketimpangan sempurna. Dalam kenyataannya ukuran Koefisien Gini dapat dibagi menjadi dua keadaan, dimana negara yang rata-rata memiliki tingkat kesenjangan tinggi nilai koefisiennya antara 0,50 sampai 0,75, sedangkan negara-negara yang distribusi pendapatannya merata nilainya antara 0,20 sampai 0,35. Dapat disimpulkan jika distribusi pendapatan tidak merata disuatu daerah maka nilai Koefisien Gini akan tinggi antara 0,50 sampai 0,75, sebaliknya jika disuatu daerah distribusi

[22] www.dpr.go.id diakses pada tanggal 11 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatannya mengalami pemerataan maka nilai Koefisien Gininya akan rendah antara 0,20 sampai 0,35[23].

Menurut Syafrizal, ketimpangan disebabkan oleh adanya karakteristik dan kondisi geografis pada masing-masing wilayah seperti kekayaan alam atau hasil bumi dari tiap wilayah atau daerah. Hal ini mengakibatkan kemampuan setiap daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga berbeda-beda. Kurangnya mobilitas dan distribusi barang dan jasa, pemusatan kegiatan ekonomi pada daerah tertentu, dan ketidak merataan alokasi modal antar wilayah juga akan mendorong tingkat ketimpangan. Ketimpangan di suatu daerah juga akan berdapak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pembangunan pada masing- masing wilayah memiliki karakterstik kebijakan yang dilakukan pada masing-masing wilayah juga berbeda.[24]

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang tema ini telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yang telah disimpulkan pada table berikut :

1. Muhammad Arif, Rossy Agustin Wicaksani, 2017 dengan judul penelitian "Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya", hasil dari penelitian tersebut adalah :

[23] Nur Afini, *Pengaruh PDRB Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pemerataan Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 28

[24] Sjahrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, (Padang : Rajawali Pers, 2012), hlm. 119-121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan pendapatan. Dari faktor itulah pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu dapat mencapai target keberhasilan dalam pembangunan sehingga menyebabkan ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan.

Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan model regresi panel menggunakan data time series yang diwakili oleh observasi dalam kurun waktu 2011-2015 sedangkan data cross secion mewakili seluruh kabupaten/kota diseluruh Provinsi Jawa Timur. Dimana hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 yang diakibatkan tenaga kerja yang berkualitas hanya mengelompok pada daerah-daerah pusat ekonomi sehingga terjadi kesenjangan ekonomi. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, penelitian tersebut menyebutkan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Indikator ketimpangan yang terjadi di Jawa Timur merupakan dampak dari tingginya pendapatan di daerah perkotaan seperti Surabaya, Kediri, Malang, dll, sedangkan di daerah lain pendapatannya relatif rendah.

2. Nita Tri Hartini, 2017, “Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015”, hasil penelitiannya adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan uji statistic menggunakan program eviews untuk menguji variabel-variabel dalam penelitiannya.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah, Investasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan, dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan.

3. Miftahur rahmah, 2019, "Pengaruh PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sumatera Barat Selama Tahun 2011-2017", hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

   Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan *fixed effect model* (FEM). Hasil dari penelitian ini yaitu PDRB perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

4. Ni Luh Putu Yuni, I Ketut Sudibia, 2015 "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali", hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

   Ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak meratanya jumlah tenaga kerja dan investasi pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu daerah. Data yang digunakan yaitu data sekunder tahun 2007-2013. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa jumlah penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

5. Nur Afini, 2019, "Pengaruh PDRB Per Kapita Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pemerataan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017", hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang adakah hubungan variabel PDRB Perkapita danIndeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pemerataan pendapatan di provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017. Metodologi yang digunakan adalahmenggunakan regresi data panel dengan model *random effects.*

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menyatakan bahwa variabel PDRB Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersamaan atau simultan berpengaruh signifikan terhadap pemerataan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan variabel PDRB Perkapita berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap pemerataaan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori, sumber referensi penelitian-penelitian terdahulu dan pembahasan-pembahasan antara variabel bebas yaitu, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

variabel terikat yaitu Ketimpangan Pendapatan, maka kerangka konseptual dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

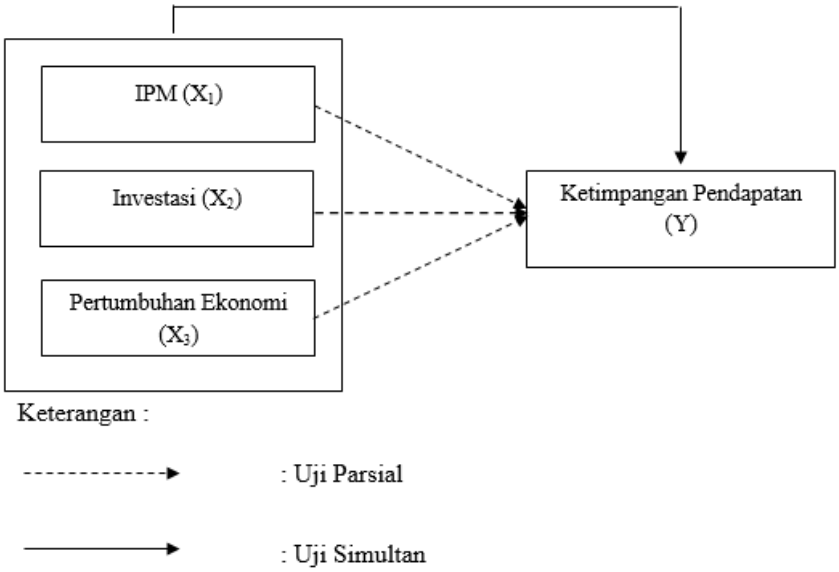

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan awal yang bersifat sementara dan akan dibuktikan kebenarannya setelah data empiris diperoleh. Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis yang berguna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H_0 diterima jika variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait.

H_1 diterima jika variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti permasalahan ekonomi terutama dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur menggunakan penelitian kuantitatif, karena memiliki tujuan memahami karakteristik dan memahami objek, yang bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan keadaan gejala sosial yang tampak melainkan lebih jauh lagi untuk melihat hubungan-hubungan kausalitas antar gejala tersebut.[25] Pengolahan data dalam penelitian ini terdapat data angka dan analisa yang menggunakan statistik yang kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan hasil perhitungan data dan dijelaskan ke dalam analisis data atau ditulis hasil penelitian.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui ketimpangan atau kesenjangan pendapatan yang terjadi antar daerah di Provinsi Jawa Timur, artinya tempat penelitiannya adalah di Provinsi Jawa Timur. Lembaga yang digunakan sebagai referensi atau acuan pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, literatur seperti jurnal ataupun internet sebagai data sekunder yang relevan dengan

[25] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

topik penelitian. Adapun waktu penelitian merupakan jangka waktu untuk peneliti dalam melakukan observasi guna kepentingan penelitian, yaitu dimulai pada bulan Januari 2020, dengan menggunakan data pada tahun 2011-2017.

C. Jenis Dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini menggunakan data panel dimana data yang digunakan adalah data per kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur periode tahun 2011-2017. Sedangkan untuk sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Timur, dan instansi pemerintah terkait, serta jurnal maupun studi literatur lainnya.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan seluruh nilai atau sifat dari objek yang memiliki variasi khusus yang digunakan untuk pengujian di dalam sebuah penelitian.[26] Dalam penelitian kuantitatif dua variabel yaitu bebas (X) danterikat (Y). Penelitian ini menggunakan variabel diantaranya :

1. Variabel Bebas (X1): Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Variabel Bebas (X2): Investasi
3. Variabel Bebas (X3): Pertumbuhan Ekonomi
4. Variabel Terikat (Y): Ketimpangan Pendapatan

[26]Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Definisi Operasional

Definisi operasional memiliki tujuan menjelaskan satu persatu dan setiap variabel penelitian yang ada guna mempermuda dalam menjelaskan setiap variabel yang di teliti dengan penjelasan setiap definisi serta mengurangi potensi adanya kesalahan pahaman pada saat melakukan penelitian.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

   IPM merupakan salah satu alat analisis untuk mengetahui ukuran pemerataan atau ketimpangan wilayah. Diukur dengan rata-rata sederhana dari tiga komponen diantaranya tingkat pendidikan, lamanya hidup, dan pendapatan rill di kabupaten dan kota di Jawa Timur selama tahun 2011-2017.

2. Investasi

   Investasi adalah nilai keseluruhan investasi yang masuk ke Jawa Timur, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri selama periode tahun 2011-2017.

3. Pertumbuhan Ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya produktivitas baik barang maupun jasa di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu sehingga akan menambah pendapatan wilayah tersebut. Dampaknya, kondisi perekonomian di wilayah tersebut lebih baik dari waktu sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah. Alat untuk mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan di Jawa Timur selama periode tahun 2011-2017 adalah dengan menggunakan rasio gini provinsi Jawa Timur.

F. Data Dan Sumber Data

1. Data

Terdapat dua penggolongan data ditinjau dari segi pengambilan, yakni : Data Primer, diperoleh dari objek atau informan secara langsung, dan Data Sekunder, diperoleh secara tidak langsung dari objek yang akan diteliti.[27] Karena penelitian ini bersifat kuantitatif maka data yang digunakan adalah sekunder, antara lain: data IPM, Investasi, dan PDRB, serta data ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2011-2017.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, serta instansi pemerintah lainnya.

[27]Hotman Simbolon, "Statistika", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialahriset kepustakaan, dimana data sekunder yang diperoleh dengan studi literatur, akan memuat tentang konsep, teori, maupun informasi yang memiliki kaitannya dengan penelitian penulis. Adapun metode lainnya yaitu dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan serta mengumpulkan data yang diperoleh dari instansi terkait.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diteliti terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data, menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linier berganda. Dengan tujuan untuk menguji pengaruh secara simultan ataupun parsial antara variabel (X) terhadap variabel (Y).[28] Metode yang digunakan adalah *Common Effect* menggunakan software Eviews 11 dan Microsoft Excel untuk memudahkan proses analisis.

Kemudian untuk aspek pengukuran variabel maka akan dilakukan beberapa pengujian beberapa uji asumsi klasik. Ada 4 (empat) uji yang terdapat pada uji asumsi klasik antara lain: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokesdasitas dan uji autokorelasi.[29] Setelah itu bisa dilanjutkan dengan uji t dan uji f.

[28]Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar Edisi VI*, (Jakarta: Erlangga, 1995), hlm. 55
[29]Eng Yeri Sutopo, Achmad Slamet, *Statistika Inferensial*, (Semarang : Penerbit ANDI, 2017), hlm. 94-113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Regresi Liner Berganda

Setalah dilakukan pengumpulan data maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, untuk itu agar dapat memenuhi standar analisis data yang perlu dilakukan adalah Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara simultan atau secara parsial terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Indek Pembangunan Manusia (X1), Investasi (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X3), dengan variabel terikatnya yaitu Ketimpangan Pendapatan (Y) dengan menggunakan metode *Common Effect*. Model dalam analisis regresi berganda akan dijelaskan dibawah ini

$$Y = \alpha + \beta 1\ X1t + \beta 2\ X2t + \beta 3\ X3t + et$$

Dimana :

Y = Ketimpangan Pendapatan

X1 : Indek Pembangunan Manusia

X2 : Investasi

X3 : Pertumbuhan Ekonomi

β : Koefisien regresi variabel bebas

α : Konstanta

e : Error

2. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk melihat apakah terdistribusi dengan normal atau tidak sebuah nilai residual. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan taraf signifikansi. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat signifikansinya > 0,05 atau sebesar 5%, itu artinya data berdistribusi normal.

3. Uji Multikolineritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan melihat ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel bebas (X) dalam suatu regresi berganda.[30] Sehingga dapat diartikan bahwa model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat hubungan di antara vairabel bebas. Model regresi yang bebas dari multikoliniearitas bisa dilihat dengan cara menghitung nilai correlation antara variabel bebas dengan menggunakan metode correlation. Jika nilai correlation < 0.4 dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukan uji heterokesdasitas adalah untuk menguji apakah ada penyimpangan dari nilai absolut untuk vaiabel bebas.[31] Karena untuk mendapatkan model regresi yang baik adalah dengan tidak adanya heteroskedastisitas di dalamnya. Jika nilai probabilitasnya >5%, maka dapat diartikan bahwa model regresi tersebut terbebas dari heteroskedastisitas.[32]

5. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya.

---

[30] Damodar N Gujarati, *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 2*, (Jakarta : Erlangga, 2006), hlm. 61
[31] Sri Subanti dan Arif Rahman Hakim, *Ekonometri*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm. 25
[32] V. Wiratna Sujarweni,*Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara sederhana analisis regresi ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga tidak diperbolehkan adanya korelasi antar observasi dengan data observasi sebelumnya. Autokorelasi muncul karena adanya observasi secara beruntun sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain.

6. Uji statistik

a. Uji simultan (uji F)

Uji ini dilakukan dengan tujuan melihat apakah masing-masing variabel independen pengaruh secara signifikan pada terhadap variabel dependen.[33] Pada uji simultan ini akan diuji secara bersama-sama apakah ketiga variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, investasi, dan indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan. Untuk melakukan uji F atau iji Simultan maka diperlukan sebuah rumus statistik seperti di bawah ini:

$$\boldsymbol{F_n = \frac{R^2/k}{(1-R^2)-(n-k-1)}}$$

Keterangan:

R : Koefisien Korelasi Berganda

n : Jumlah Sampel

k : Jumlah komponen variabel bebas

Rumus hipotesis berikut adalah langkah untuk melakukan uji pengaruh bersama-sama atau simultan:

[33]Sri Subanti dan Arif Rahman Hakim, *Ekonometri*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H0 : β0 = 0 ”Tidak ada pengaruh antara IPM, Investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur

H1 : β1 ≠ 0 “Ada pengaruh antaraIPM, Investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur”

Ketentuan yang diberlakukan dalam uji F yaitu:

H_0 : ditolak apabila $SigF_{hitung} < \alpha$ (tingkat signifikasi yang digunakan)

H_0 : diterima apabila $SigF_{hitung} > \alpha$ (tingkat signifikasi yang digunakan)

Jika dalam melakukan proses uji F terjadi penolakan maka artinyaantara variabel X dan Y memiliki pengaruh secara bersama-sama. Namun jika yang terjadi diterima maka itu artinya tidak ada pengaruh secara simultan dari variabel X terhadap variabel Y.

b. Uji parsial (uji t)

Uji t dilakukan dengan tujuan melihat pengaruh anatara variabel X dengan Y secara individu atau sendiri-sendiri. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara ttabel dan thitung . Dalam melakukan uji Parsial maka diperlukan sebuah rumus yaitu:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Keterangan:

r : Koefisien korelasi

n : Banyak data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi uji t sudah tertera yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh secara sendiri atau parisal dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu digunakan sebuah rumus untuk menguji hipotesis. Berikut hipotesis yang akan diuji :

H0 : $\beta 1 = 0$ (tidak ada pengaruh)

H1 : $\beta 1 \neq 0$ (ada pengaruh)

$t_{hitung} = (\beta 1 - 0) / S\beta 1$

Dimana :

$S\beta 1|$ = Standar Error dariβ

B1 = Koefisien regresi

7. Determinasi (R2)

Nilai R^2 digunakan untuk menunjukkan seberapa besar presentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Besarnya pengaruh variabel tersebut dilihat dari besarnya nilai R^2 , dimana jika nilai $R^2 = 0$, maka antara variabel X dan variabel Y tidak memiliki pengaruh, namun jika nilai $R^2 = 1$, maka sumbangan variabel X terhadap variabel Y adalah sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELIIAN

A. Gambar Umum Kondisi Daerah

1. Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Timur membentang garis antara 111º 0 BT - 114º 4 BT dan7º 12 LS - 8º 48 LS, yang memiliki luas daratan sebesar 47.130,15 Km² dan luas wilayah lautan sebesar 110.764,28 Km². Kondisi tipografi Provinsi JawaTimur juga beranekaragam antara lain, pegunungan perbukitan dan kepulauan. Dengan iklim tropis lembab kemudian curah hujannya rata – rata2. 100 mm setiap tahun, suhu di daerah Provinsi Jawa Timur berkisar antara 18º- 35º C.[34]

Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Timur

Sumber: pppjatim.or.id

[34] Profil Singkat Provinsi Jawa Timur, diakses pada 20-06-2020 https://www.unicef.org/indonesia/id/Bahasa_East_Java_lowres2.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Timur ialah provinsi yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah disebelah barat, selat Bali disebelah timur, laut jawa di utara dan samudera Hindia disebelah selatan. Ibukota provinsi Jawa Timur adalah kota metropolitan Surabaya. Mayoritas penduduk provinsi Jawa Timur berasal dari suku Jawa yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian.Terdapat beberapa kota besar di wilayah Jawa Timur, diantaranya adalah Malang, Surabaya, Lumajang, Pasuruan, Kediri, Madiun, Madura, Lamongan, Sidoarjo dan yang paling ujung adalah Banyuwangi.

Provinsi Jawa Timur memiliki struktur geologi yang di dominasi dengan batuan sedimen alluvium. Dibagian tengah wilayah Provinsi Jawa Timur juga terdapat sekian banyak kategori batuan gunung merapi sehingga daerah ini tergolong subur. Beragam jenis batuan besar di Provinsi Jawa Timur mengakibatkan melimpahnya ketersediaan bahan tambang disekitar wilayah ini. Sedangkan untuk batas-batas antar wilayahnya disebelah utara perbatasan dengan Laut Jawa, lalu disebelah selatan ada Samudera Indonesia, untuk disebelah timur perbatasan dengan Selat Bali dan disebelah Barat perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

2. Demografis Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 39.292.972 ribu dengan laju pertumbuhan penduduk sebanyak 0,56%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ciri khas dari penduduk Jawa Timur ialah memilikiikatan yang kuat dalam persahabatan dan teritorial. Ini disebabkan mereka dari berbagai kultur sehingga mempersatukan semua perbedaan dengan sikap yang saling menghargai dan menghormati.

Terdapat lima suku besar yang mendominasi penduduk di provinsi Jawa Timur, Yaitu Suku Jawa, suku yang paling banyak tersebar di Jawa Timur. Lalu ada Suku Tengger, suku yang menempati 3 desa yang berada di kecamatan Sakapura, Kabupaten Probolinggo. Mereka terkenal karna berada di pegunungan Tengger di kawasan Bromo. Mereka juga memiliki basa sendiri yang mereka percayai keturunan dari bahasa kawi, karena menggunakan kalimat-kalimat kuno yang mungkin sudah tidak digunakan lagi dalam bahasa jawa modern.

Berikutnya terdapat Suku Osing atau Using, berasal dari keturunan dari Kerajaan Blambangan yang berangkat mengasingkan diri sewaktu zaman Majapahit. Mereka menyebar dibeberapa kecamatan yang ada di kabupaten Banyuwangi. Mereka mempunyai bahasa sendiri yang penggunaannya dibedakan menjadi dua gaya. Awal metode Osing, yaitu gaya bahasa yang diucapkan dalam pergaulan sehari-hari tanpa mengenal strata. Sedangkan yang kedua adalah Metode Besiki, yaitu bahasa Jawa halus dan hanya digunakan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi tertentu yang berhubungan dengan keagamaan dan ritual khusus seperti pertemuan pada saat pernikahan.[35]

Suku Madura yang mendiami Pulau Madura dan bagian timur Provinsi Jawa Timur. Menggunakan bahasa Madura dengan dialek yang khas. Suku ini dikenal dengan karakter kuat dan keras. Sehingga dikenal cukup tangguh ketika berada di perantauan.[36]

Kemudian terdapat Suku Bawean yang berasal Pulau Bawean terletak di Laut Jawa antara Pulau Kalimantan bagian utara dan Pulau Jawa bagian selatan. Suku Bawean dikenal juga dengan sebutan Boyan. Maksudnya sopir atau tukang kebun, sebab itu merupakan profesi mayoritasnya.[37]

3. Kondisi Rasio Gini

Rasio Gini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi penduduk yang ada di suatu wilayah.[38] Pada suatu negara perkembangan di tiap-tiap daerah berbeda dikarenakan tiap daerah tersebut memiliki ciri-cirinya sendiri. Untuk itu pemerintah perlu mengetahui ciri-ciri tiap daerahnya beserta distribusi pendapatannya. Alat ukur yang umumnya digunakan sebagai perhitungan mengetahui persebaran distribusi pendapatan di suatu wilayah inilah yang dinamakan indeks gini.

---

[35] Gestama. Peta, Sejarah kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur lengkap.Https://www.Abundancethebook.Com/Peta-Jawa-Timur/. Diakses pada tanggal 19 mei 2020
[36] Ibid
[37] Ibid
[38]https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-17.pdf diakses pada 3 Oktober 2020 pada pukul 09.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1

Gini Ratio Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2017 Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Gini Rasio						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Pacitan	0,34	0,31	0,33	0,31	0,33	0,36	0,32
Kabupaten Ponorogo	0,29	0,31	0,34	0,31	0,36	0,36	0,34
Kabupaten Trenggalek	0,34	0,32	0,35	0,31	0,37	0,39	0,35
Kabupaten Tulungagung	0,32	0,34	0,37	0,31	0,36	0,37	0,35
Kabupaten Blitar	0,33	0,36	0,33	0,3	0,33	0,34	0,37
Kabupaten Kediri	0,31	0,32	0,3	0,31	0,34	0,38	0,34
Kabupaten Malang	0,33	0,32	0,38	0,33	0,38	0,32	0,35
Kabupaten Lumajang	0,27	0,27	0,23	0,23	0,29	0,35	0,31
Kabupaten Jember	0,31	0,28	0,26	0,26	0,33	0,31	0,34
Kabupaten Banyuwangi	0,32	0,29	0,3	0,29	0,34	0,33	0,34
Kabupaten Bondowoso	0,29	0,3	0,28	0,27	0,32	0,35	0,32
Kabupaten Situbondo	0,26	0,27	0,28	0,29	0,33	0,35	0,33
Kabupaten Probolinggo	0,28	0,3	0,34	0,32	0,3	0,31	0,36
Kabupaten Pasuruan	0,28	0,3	0,28	0,28	0,32	0,32	0,34
Kabupaten Sidoarjo	0,31	0,33	0,3	0,3	0,35	0,37	0,34
Kabupaten Mojokerto	0,27	0,28	0,28	0,27	0,31	0,3	0,32
Kabupaten Jombang	0,37	0,3	0,28	0,32	0,32	0,34	0,34
Kabupaten Nganjuk	0,31	0,38	0,33	0,3	0,35	0,36	0,33
Kabupaten Madiun	0,29	0,34	0,3	0,28	0,32	0,34	0,32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Magetan	0,31	0,33	0,34	0,32	0,34	0,37	0,39
Kabupaten Ngawi	0,3	0,3	0,32	0,34	0,34	0,34	0,34
Kabupaten Bojonegoro	0,27	0,31	0,32	0,28	0,32	0,32	0,29
Kabupaten Tuban	0,28	0,27	0,3	0,24	0,29	0,33	0,31
Kabupaten Lamongan	0,29	0,27	0,31	0,27	0,3	0,3	0,32
Kabupaten Gresik	0,33	0,43	0,36	0,28	0,31	0,33	0,29
Kabupaten Bangkalan	0,3	0,28	0,28	0,33	0,32	0,31	0,3
Kabupaten Sampang	0,26	0,25	0,25	0,23	0,3	0,31	0,29
Kabupaten Pamekasan	0,28	0,24	0,25	0,26	0,34	0,36	0,33
Kabupaten Sumenep	0,27	0,3	0,29	0,25	0,26	0,31	0,24
Kota Kediri	0,39	0,39	0,33	0,31	0,4	0,39	0,4
Kota Blitar	0,34	0,38	0,4	0,35	0,37	0,41	0,39
Kota Malang	0,36	0,48	0,38	0,37	0,38	0,41	0,42
Kota Probolinggo	0,33	0,28	0,38	0,33	0,36	0,31	0,37
Kota Pasuruan	0,37	0,37	0,32	0,31	0,39	0,4	0,38
Kota Mojokerto	0,36	0,3	0,3	0,31	0,36	0,37	0,39
Kota Madiun	0,33	0,35	0,43	0,34	0,38	0,42	0,36
Kota Surabaya	0,37	0,4	0,37	0,39	0,42	0,39	0,39
Kota Batu	0,32	0,32	0,31	0,29	0,36	0,34	0,3

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.1 pada bab sebelumnya, terdapat kesimpulan bahwa perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012-2017 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2012, nilai Gini Ratio Jawa Timur hanya sebesar 0,351, namun di tahun 2017 nilai Gini Ratio mencapai angka 0,415. Berdasarkan daerah tempat tinggal, nilai Gini Ratio di daerah perkotaan terendah yaitu 0,358 di tahun 2011 dan tertinggi yaitu mencapai 0,442 di tahun 2017. Sedangkan di daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedesaan, nilai Gini Ratio terendah yaitu pada tahun 2011 yang hanya sebesar 0,298 dan tertinggi di tahun 2017 yang mencapai angka 0,317.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki nilai Gini Ratio terbesar dan terkecil. Kota Surabaya, Malang, Mojokerto, Blitar, dan Kediri adalah beberapa yang memiliki nilai Gini Ratio berkisar antara 0,37 - 0,42. Sedangkan daerah yang memiliki nilai Gini Ratio rendah diantaranya yaitu Kabupaten Lumajang, Bojonegoro, Sampang, Sumenep, dll dengan nilai berkisar antara 0,29 - 0,3. Hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan

4. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia

Indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan kualitas hidup manusiasalah satunya adalah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ada 3 (tiga) hal yang menjadi poin penting dalam pembangunan manusia antara lain angka haapan hidup, tingkat melek huruf atau lama sekolah, dan kemampuan daya beli atau standart hidup. Perkembangan pembangunan manusia dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia supaya tiap penduduk mendapatkan kesempatan yang sangat banyak untuk hidup lebih sejahtera, sehat, berpendidikan, serta mempunyai keterampilan untuk bekal memperoleh pendapatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Empat daerah di Jawa Timur masih masuk dalam zona merah pendidikan. Keempat daerah itu adalah Probolinggo, Situbondo, Sampang, dan Sumenep. Dinas Pendidikan Jawa Timur menyatakan akan mendorong dan membantu peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Sebelumnya, ada delapan daerah di Jatim yang masuk dalam zona bahaya. Masuknya daerah-daerah ini dalam "zona bahaya" terkait kondisi dan kualitas pendidikannya dalam menunjang indeks pembangunan manusia (IPM).

Tabel 4.2

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2017 Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Indek Pembangunan Manusia						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Pacitan	62,03	62,94	63,38	63,81	64,92	65,74	66,51
Kabupaten Ponorogo	65,28	66,16	67,03	67,4	68,16	68,93	69,26
Kabupaten Trenggalek	64,27	65,01	65,76	66,16	67,25	67,78	68,1
Kabupaten Tulungagung	67,76	68,29	69,3	69,49	70,07	70,82	71,24
Kabupaten Blitar	65,47	66,17	66,49	66,88	68,13	68,88	69,73
Kabupaten Kediri	66,84	67,29	68,01	68,44	68,91	69,87	70,47
Kabupaten Malang	63,79	64,71	65,2	65,59	66,63	67,51	68,47
Kabupaten Lumajang	60,72	61,31	61,87	62,33	63,02	63,74	64,23
Kabupaten Jember	60,64	61,31	62,43	62,64	63,04	64,01	64,96
Kabupaten Banyuwangi	65,48	66,12	66,74	67,31	68,08	69	69,64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bondowoso	60,46	62,24	63,21	63,43	63,95	64,52	64,75
Kabupaten Situbondo	60,82	62,23	63,43	63,91	64,53	65,08	65,68
Kabupaten Probolinggo	60,3	61,33	62,61	63,04	63,38	64,12	64,28
Kabupaten Pasuruan	61,43	62,31	63,74	64,35	65,04	65,71	66,69
Kabupaten Sidoarjo	74,48	75,14	76,39	76,78	77,43	78,17	78,7
Kabupaten Mojokerto	68,71	69,17	69,84	70,22	70,85	71,38	72,36
Kabupaten Jombang	66,84	67,82	68,63	69,07	69,59	70,03	70,88
Kabupaten Nganjuk	66,58	68,07	68,98	69,59	69,9	70,5	70,69
Kabupaten Madiun	65,98	67,32	68,07	68,6	69,39	69,67	70,27
Kabupaten Magetan	68,52	69,56	69,86	70,29	71,39	71,94	72,6
Kabupaten Ngawi	65,84	66,72	67,25	67,78	68,32	68,96	69,27
Kabupaten Bojonegoro	63,22	64,2	64,85	65,27	66,17	66,73	67,28
Kabupaten Tuban	62,47	63,36	64,14	64,58	65,62	66,19	66,77
Kabupaten Lamongan	66,21	67,51	68,9	69,42	69,84	70,34	71,11
Kabupaten Gresik	71,11	72,12	72,47	72,84	73,57	74,46	74,84
Kabupaten Bangkalan	58,63	59,65	60,19	60,71	61,49	62,06	62,3
Kabupaten Sampang	55,17	55,78	56,45	56,98	58,18	59,09	59,9
Kabupaten Pamekasan	60,42	61,21	62,27	62,66	63,1	63,98	64,93
Kabupaten Sumenep	58,7	60,08	60,84	61,43	62,38	63,42	64,28
Kota Kediri	72,93	73,66	74,18	74,62	75,67	76,33	77,13
Kota Blitar	73,08	73,53	74,53	75,26	76	76,71	77,1
Kota Malang	77,36	78,04	78,44	78,96	80,05	80,46	80,65
Kota Probolinggo	68,14	68,93	70,05	70,49	71,01	71,5	72,09
Kota Pasuruan	70,41	72,01	71,89	73,23	73,78	74,11	74,39
Kota Mojokerto	73,47	74,2	74,91	75,04	75,54	76,38	76,77
Kota Madiun	76,48	77,21	78,41	78,81	79,48	80,01	80,13
Kota Surabaya	77,62	78,05	78,51	78,87	79,47	80,38	81,07
Kota Batu	69,76	70,62	71,55	71,89	72,62	73,57	74,26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Selain masih banyaknya angka buta aksara, tingkat pendidikan di daerah-daerah tersebut juga kalah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. ”Namun, alhamdulillah, pelan-pelan bisa kita entaskan mereka dari zona merah. Kini tinggal empat daerah penghuni zona merah,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun, Kamis (26/1/2012).Keempat daerah yang mulai keluar dari zona merah adalah Jember, Situbondo, Pamekasan, dan Bangkalan. Dalam satu tahun terakhir, tingkat dan kualitas penduduk di empat wilayah ini kian membaik[39].

5. Kondisi Investasi

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 tentang penanaman modal menjelaskan bahwa bentuk penanaman modal dapat dilakukan oleh investor asing maupun dalam negeri dengan tujuan membuka usaha.Investasi yang dimaksud adalahnilai keseluruhan investasi yang masuk ke Jawa Timur, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri selama periode tahun 2011-2017.

Investasi dianggap sangat penting ditengah-tengah keterbatasan pemerintah dalam membiayai segala jenis kebutuhan pembangunan, untuk pemerintah merangsang partisipasi sektor swasta untuk menyukseskan program pembangunan nasional atau disuatu daerah. Investasi menjadi salah satu alternatif yang dianggap baik bagi

[39] Badan Pembangunan dan Perekonomian Provinsi Jawa Timur dalam website http://bappeda.jatimprov.go.id, diakses pada tanggal 22/10/2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan tersebut.

Provinsi Jawa Timur di Triwulan pertama Tahun 2012 mulai menunjukkan geliat yang cukup menggairahkan. Sebab angka investasi naik 41,52 persen dari kuartal yang sama di Tahun 2011, dengan total investasi yang sudah masuk Rp25,70 triliun. Investasi asing yang paling banyak menginvestasikan modal mereka di Jatim adalah industri penyedap makanan di Jombang dengan tambahan investasi sekitar 109,8 juta dolar AS.[40]

Dari 10 jenis bidang usaha di Jawa Timur, yang banyak diminati oleh para investor asing dan dalam negeri pada semester I tahun 2012 secara berurutan adalah: Industri Makanan, Industri Barang Logam, Industri Plastik, Industri Kimia dan Industri Mineral Non Logam. Sementara dari 11 negara asal investasi asing yang paling unggul investasi di Jawa Timur asal negara: Singapura, RRC, Korea Selatan, Malaysia, Jepang. Untuk menyetujui investasi Semester I tahun 2012 di Jawa Timur baik investasi asing maupun dalam negeri merupakan 202 Izin Usaha Tetap dengan total investasi sebesar Rp. 26,90 Triliyun, dimana investasi dalam negeri sebesar Rp. 12,13 Trilun (45%) dan investasi asing sebesar Rp.14,77 Triliyun (55%).[41]

[40]**Pertumbuhan Perkembangan Investasi** http://ejisc.dpmptsp.jatimprov.go.id. Diakses pada tanggal 19 mei 2020
[41]ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.3

Investasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2017 Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Investasi						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Pacitan	37,83	37,96	37,8	38,52	38,23	38,55	39,15
Kabupaten Ponorogo	27,03	26,73	26,53	26,35	26,64	26,95	27,41
Kabupaten Trenggalek	19,2	19,57	19,46	19,25	19,43	19,63	19,83
Kabupaten Tulungagung	27,04	27,19	27,01	27,12	26,93	27,07	27,47
Kabupaten Blitar	27,02	27,31	27,81	27,93	27,78	27,77	27,94
Kabupaten Kediri	29,71	29,76	29,42	29,6	29,7	30,36	30,77
Kabupaten Malang	20,7	21,16	21,05	20,61	20,59	20,86	21,03
Kabupaten Lumajang	20,7	21,16	21,05	20,61	20,59	20,86	21,03
Kabupaten Jember	17,7	18,19	18,37	18,16	18,45	18,44	18,72
Kabupaten Banyuwangi	28,49	29,44	29,34	28,97	30,57	31,05	31,48
Kabupaten Bondowoso	23,79	24,42	24,84	24,88	25,14	25,28	25,49
Kabupaten Situbondo	24,22	24,45	23,93	23,94	23,91	24,08	24,29
Kabupaten Probolinggo	28,01	29,38	28,77	28,09	27,37	27,47	27,99
Kabupaten Pasuruan	36,09	35,9	34,72	33,35	33,07	32,27	32,5
Kabupaten Sidoarjo	36,09	35,9	34,72	33,35	33,07	32,27	32,5
Kabupaten Mojokerto	25,3	26,26	26,41	26,19	26,08	26,07	26,05
Kabupaten Jombang	29,13	29,89	30,12	30,26	30,13	30,4	30,75
Kabupaten Nganjuk	27,14	27,73	27,51	27,34	27,37	27,6	27,82
Kabupaten Madiun	18,81	19,19	19,24	19,13	19,36	19,66	19,88
Kabupaten Magetan	22,82	22,57	22,22	22,27	22,09	22,18	22,34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Ngawi	21,15	20,54	20,11	19,56	19,33	19,83	21,75
Kabupaten Bojonegoro	18,56	19,44	20,31	21,07	18,69	16,23	15,83
Kabupaten Tuban	39,07	38,88	37,87	36,63	36,25	36,24	36,47
Kabupaten Lamongan	31,12	31,82	31,96	30,87	31,03	31,56	31,95
Kabupaten Gresik	21,54	22,12	22,16	21,66	22,67	22,67	23
Kabupaten Bangkalan	19,3	22,66	23,5	22,92	25,71	27,08	27,81
Kabupaten Sampang	24,69	24,7	24,5	25,61	26,51	26,66	26,96
Kabupaten Pamekasan	30,9	29,94	30,13	30,52	30,12	30,5	31,26
Kabupaten Sumenep	23,03	22,9	21,45	21,28	21,91	22,65	23,35
Kota Kediri	19,04	19,6	19,43	19,01	18,96	18,83	19,05
Kota Blitar	20,51	20,72	20,23	19,8	19,77	19,79	19,83
Kota Malang	31,74	32	31,98	31,48	32,08	32,35	32,52
Kota Probolinggo	18,65	19,39	19,08	18,72	18,71	18,96	19,16
Kota Pasuruan	32,65	33,58	33,76	33,54	33,78	34,09	34,4
Kota Mojokerto	32,55	33,41	33,08	33,17	33,55	34,61	33,98
Kota Madiun	18,81	19,19	19,24	19,13	19,36	19,66	19,88
Kota Surabaya	28,8	29,15	28,53	27,8	27,56	27,69	27,79
Kota Batu	29,71	30,45	31,06	31,55	31,98	31,73	31,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

"Membaiknya iklim investasi di Jawa Timur dan kondisi keamanan yg kondusif menjadikan Jawa Timur memiliki daya tarik dan menjadi tujuan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Daya beli masyarakat yang mulai membaik juga menjadikan salah satu hal yang dipertimbangkan oleh para investor. Selain hal tersebut, infrastruktur yang memadai dan kondisi politik yang harmonis antar Kepala Daerah, juga menjadikan Jatim sebagai primadona untuk berinvestasi", ungkap pria yang akrab di panggil Pakde Karwo ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Di tahun 2016 ini, Pemprov Jatim melalui Badan Penanaman Modal (BPM) Daerah Jatim berupaya untuk menggait investasi sebesar Rp. 75 Trilliun dari izin prinsip yang sudah mengajukan untuk tahun 2015 mencapai Rp. 172,57 triliun dengan komposisi PMA Rp. 130,75 triliun, PMDN Rp. 42,32 triliun. Pada tahun 2015 Jawa Timur mampu meraih investasi sebesar Rp. 67,91 Trilliun. Dengan ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian Jawa Timur dimana pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada diatas rata-rata nasional", ujar Pakde Karwo sapaan Gubernur Jatim ini usai penandatanganan.[42]

6. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi karena pembangunan ekonomi selalu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Biasanya diketahui dengan meningkatnya PDB (produk domestik bruto) atau PDRB (produk domestik regional bruto) yang ditandai peningkatan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari proses naiknya pendapatan perkapita dalam jangka panjang, tidak memperhatikan pertambahan penduduk, tidak pemperhatikan pemerataan pendapatan, dan setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak.

[42]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tolak ukur yang digunbakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat PDRB nya. Nilai PDRB yang terus tumbuh dari tahun ke tahun menunjukkan perekonomian di daerah tersebut terus naik.

Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif (Januari – Juni 2015) Jawa Timur mencapai 5,22 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Banten di Pulau Jawa dan lebih tinggi 0,52 poin dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional (4,70 persen). Dengan begitu, Jawa Timur mampu memberikan kontribusi terhadap 33 Provinsi (Nasional) sebesar 14,51 persen. Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif (Januari – Juni 2015) Jawa Timur mencapai 5,22 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Banten di Pulau Jawa dan lebih tinggi 0,52 poin dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional (4,70 persen). Dengan begitu, Jawa Timur mampu memberikan kontribusi terhadap 33 Provinsi (Nasional) sebesar 14,51 persen[43].

Tabel 4.4

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2017

Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	PDRB						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Pacitan	6,29	6,33	5,87	5,21	5,10	5,21	4,98
Kabupaten Ponorogo	5,70	5,98	5,14	5,21	5,25	5,29	5,10

[43] Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam website http://jatimprov.go.id, diakses pada 22/10/2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Trenggalek	5,94	6,22	6,00	5,28	5,03	5,00	5,02
Kabupaten Tulungagung	6,37	6,47	6,13	5,46	4,99	5,02	5,08
Kabupaten Blitar	5,43	5,62	5,06	5,02	5,06	5,08	5,07
Kabupaten Kediri	6,03	6,11	5,82	5,32	4,88	5,02	4,90
Kabupaten Malang	6,65	6,77	5,30	6,01	5,27	5,30	5,43
Kabupaten Lumajang	6,20	6,00	5,58	5,32	4,62	4,70	5,05
Kabupaten Jember	5,49	5,83	6,06	6,21	5,36	5,23	5,11
Kabupaten Banyuwangi	6,95	7,24	6,71	5,72	6,01	5,38	5,45
Kabupaten Bondowoso	6,07	6,09	5,81	5,05	4,95	4,97	5,03
Kabupaten Situbondo	5,38	5,43	6,19	5,79	4,86	*5,00*	5,07
Kabupaten Probolinggo	5,88	6,44	5,15	4,90	4,76	4,77	4,46
Kabupaten Pasuruan	6,69	7,50	6,95	6,74	5,38	5,44	5,72
Kabupaten Sidoarjo	7,04	7,26	6,89	6,44	5,24	5,51	5,80
Kabupaten Mojokerto	6,61	7,26	6,56	6,45	5,65	5,49	5,74
Kabupaten Jombang	5,96	6,15	5,93	5,42	5,36	5,40	5,36
Kabupaten Nganjuk	5,75	5,85	5,40	5,10	5,18	5,29	5,26
Kabupaten Madiun	6,02	6,12	5,67	5,34	5,26	5,27	5,42
Kabupaten Magetan	5,64	5,79	5,85	5,10	5,17	5,31	5,09
Kabupaten Ngawi	6,11	6,63	5,50	5,82	5,08	5,21	5,07
Kabupaten Bojonegoro	10,39	3,77	2,37	2,29	17,42	21,95	10,26
Kabupaten Tuban	6,84	6,29	5,85	5,47	4,89	4,90	5,00
Kabupaten Lamongan	6,67	6,92	6,93	6,30	5,77	5,86	5,52
Kabupaten Gresik	6,48	6,92	6,05	7,04	6,61	5,49	5,83
Kabupaten Bangkalan	3,31	-1,42	0,19	7,19	-2,66	0,66	3,53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sampang	2,50	5,77	6,53	0,08	2,08	6,17	4,69
Kabupaten Pamekasan	6,22	6,25	6,10	5,62	5,32	5,35	5,04
Kabupaten Sumenep	6,13	9,96	14,45	6,23	1,27	2,58	2,86
Kota Kediri	4,29	5,27	3,52	5,85	5,36	5,54	5,14
Kota Blitar	6,42	6,52	6,49	5,88	5,68	5,76	5,78
Kota Malang	6,04	6,26	6,20	5,80	5,61	5,61	5,69
Kota Probolinggo	5,95	6,49	6,47	5,93	5,86	5,88	5,88
Kota Pasuruan	6,28	6,31	6,51	5,71	5,53	5,46	5,47
Kota Mojokerto	5,97	6,09	6,20	5,83	5,74	5,77	5,65
Kota Madiun	6,79	6,83	7,68	6,62	6,15	5,90	5,93
Kota Surabaya	7,13	7,35	7,58	6,96	5,97	6,00	6,13
Kota Batu	7,13	7,26	7,29	6,90	5,36	5,23	6,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Seiring dengan perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur *y-on-y* yang merupakan pertumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh faktor musiman untuk pergerakan naik turunnya disetiap triwulan. Pergerakan pertumbuhan y-on-y dipengaruhi banyak faktor diantaranya berbagai kebijakan baik yang bersifat umum, seperti kenaikan harga BBM maupun yang bersifat khusus untuk masing-masing kategori ekonomi[44]

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2011 diproyeksikan bisa mencapai 7,12% yang berarti mengalami pertumbuhan tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Selama semester I tahun 2012, semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor

[44]Ibid. Hal: 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,37 persen dengan sumbangan pertumbuhan 0,76 persen, di ikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,12 persen dengan sumbangan pertumbuhan tertinggi sebesar 3,15 persen.[45]

Ekonomi Jawa Timur Tahun 2016 tumbuh lebih baik bila dibandingkan Tahun 2015 karena semua kategori dari sisi produksi mengalami pertumbuhan positif. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,18% diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,49%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Ekspor Luar Negeri sebesar 12,83%.[46]

Perekonomian Jawa Timur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2018 mencapai Rp 2.189,78 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 1.563,76 triliun. Ekonomi Jawa Timur tahun 2018 (c-to-c) tumbuh 5,50 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,63 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,61 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh

[45]Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur - http://ejisc.dpmptsp.jatimprov.go.id. Diakses pada tanggal 19 mei 2020

[46]Biro Adm. Perekonomian Jatim – data dinamis perekonomian Jawa Timur desember 2017. Hal 1 - https://ro-ekonomi.jatimprov.go.id/laporan-kinerja/Data%20Dinamis. Diakses pada tanggal 19 mei 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh 6,57 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 6,08 persen[47].

B. Analisis Data

1. Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, pengaruh indeks pembangunan manusia, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan alat bantu E-views 11.

Tabel 4.5

Hasil Uji Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000198	0.024889	-0.007968	0.9936
IPM	0.005108	0.000351	14.54922	0.0000
INVESTASI	-0.000546	0.000337	-1.619237	0.0066
PDRB	0.001624	0.001019	1.593844	0.0112

Root MSE	0.030939	R-squared	0.447612
Mean dependent var	0.325602	Adjusted R-squared	0.441287
S.D. dependent var	0.041707	S.E. of regression	0.031175
Akaike info criterion	-4.083507	Sum squared resid	0.254625
Schwarz criterion	-4.029620	Log likelihood	547.1064
Hannan-Quinn criter.	-4.061858	F-statistic	70.76824
Durbin-Watson stat	1.406394	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : hasil olahan eviews 11

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.5, diperoleh konstanta regresi sebesar -0.000198, koefisien regresi variabel Indek Pembangunan Manusia sebesar 0.005108, koefisien regresi variabel Investasi sebesar -

[47]Biro Adm. Perekonomian Jatim – data dinamis perekonomian Jawa Timur desember 2019. Hal 15 - https://ro-ekonomi.jatimprov.go.id/laporan-kinerja/Data%20Dinamis. Diakses pada tanggal 19 mei 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0.005108, dan koefisien regresi variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.001624. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka diperoleh persamaan regresi antara variabel indek pembangunan manusia, investasi, dan pertumuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut:

Y = -0.000198- 0.005108 X1 + -0.005108 X2 - 0.001624 X3

Dengan :

Y = Ketimpangan Pendapatan

X1 = Indek Pembangunan Manusia

X2 = Investasi

X3 = Pertumbuhan Ekonomi

2. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga untuk memenuhi standar analisis data yang perlu dilakukan adalah mengaplikasikan beberapa uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan umtuk menguji sebuah model regresi, variabel residual memiliki distribusi yang normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji *Jarque-bera*,yang dilihat dari nilai probabilitasnya. Jika nilai dari probabilitas > 0.05, maka dapat dikatakan *error term* berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

probabilitas < 0.05 dapat dikatakan bahwa *error term* tidak berdistribusi normal.

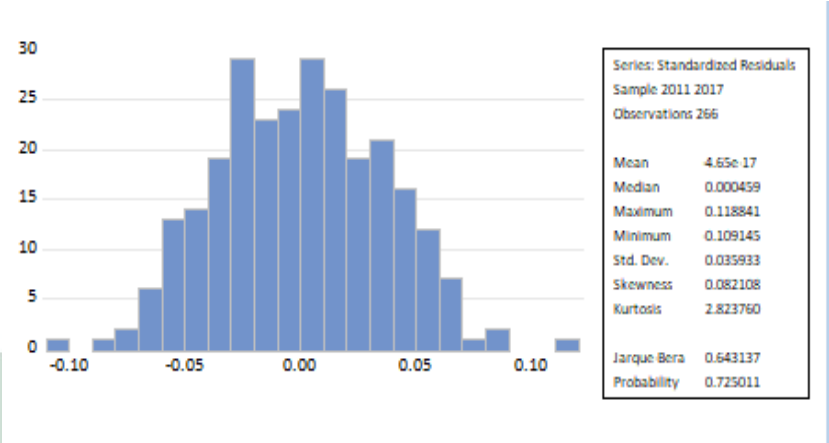

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Sumber : hasil olahan Eviews11

Dengan menggunakan uji ini diperoleh hasil analisis bahwa semua variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normalterlihat nilai probabititas pada uji normalitas menggunakan uji Jarque-bera adalah sebesar 0.725011 yang berarti> 0.05. sehingga dapat disimpulkan memenuhi asumsi berdistribusi normal.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dengan menghitung nilai correlation antar variabel bebas dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan metode correlation jika nilai nya < 0.4 berarti bebas dari multikolinearitas.

Gambar 4.3 hasil uji multikolineritas

	Correlation		
	IPM	INVESTASI	PDRB
IPM	1.000000	0.077155	0.151187
INVEST...	0.077155	1.000000	-0.043956
PDRB	0.151187	-0.043956	1.000000

Sumber : *hasil olahan Eviews (2020)*

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai korelasi antar variabel bebas yang bernilai < 0.4, maka dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

HeteroskedastisitasVarian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain mempunyai varian yang berbeda. Jika sama namanya Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak mempunyai Heteroskedastisitas.

Untuk melihat adanya heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser, dimana dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Jika nilai probabilitasnya > 0.05, maka dapat diartikan bahwa model regresi tersebut terbebas dari heteroskedastisitas[48]

[48]Misbahuddin dan Iqbal Hasan, "Analisis Data Penelitian dengan Statistik", (Jakarta. Bumi Aksara, 2013), hlm. 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.6

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.002603	0.014744	0.176522	0.8600
IPM	0.000323	0.000208	1.554396	0.1213
INVESTASI	-6.68E-05	0.000200	-0.334261	0.7385
PDRB	0.000327	0.000604	0.541620	0.5885

Root MSE	0.018328	R-squared	0.011697
Mean dependent var	0.024846	Adjusted R-squared	0.000380
S.D. dependent var	0.018471	S.E. of regression	0.018468
Akaike info criterion	-5.130648	Sum squared resid	0.089358
Schwarz criterion	-5.076760	Log likelihood	686.3761
Hannan-Quinn criter.	-5.108999	F-statistic	1.033613
Durbin-Watson stat	2.082906	Prob(F-statistic)	0.378180

Sumber : Hasil olahan Eviews (2020)

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan semua variabel penelitian tidak terjadi Heteroskedastisitas. sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian memenuhi asumsi Non Heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tujuan autokorelasi adalah untuk melihat korelasi antar variabel. Dalam uji ini, model regresi dinyatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai probability hasil pengujian > 0,05.

Tabel 4.7

Hasil Uji Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.034691	0.017576	1.973819	0.0499
IPM	-0.000138	0.000250	-0.550815	0.5824
INVESTASI	-0.000169	0.000234	-0.721620	0.4714
PDRB	0.000408	0.000651	0.626853	0.5315
RESIDABS(-1)	0.007287	0.069399	0.104996	0.9165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RESIDABS(-2)	0.096823	0.070277	1.377736	0.1700

Root MSE	0.017738	R-squared	0.016130
Mean dependent var	0.025673	Adjusted R-squared	-0.010606
S.D. dependent var	0.017930	S.E. of regression	0.018024
Akaike info criterion	-5.163108	Sum squared resid	0.059778
Schwarz criterion	-5.060570	Log likelihood	496.4952
Hannan-Quinn criter.	-5.121571	F-statistic	0.603308
Durbin-Watson stat	1.947760	Prob(F-statistic)	0.697463

Sumber : Hasil olahan Eviews (2020)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas, nilai probability setiap variabel adalah > 0,05 maka disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model tersebut.

3. Uji Statistik

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel bebas secara parsial atau secara masing-masing terhadap variabel terikat. Cara mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel bebas adalah dengan melihat nilai Prob. masing-masing variabel bebas. Jika nilai Prob < 0.05 maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika nilai Prob > 0.05 maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 4.8

Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000198	0.024889	-0.007968	0.9936
IPM	0.005108	0.000351	14.54922	0.0000
INVESTASI	-0.000546	0.000337	-1.619237	0.0066
PDRB	0.001624	0.001019	1.593844	0.0112

Sumber : Hasil olahan Eviews (2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil uji parsial di atas, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut :

1) Nilai Prob variabel IPM terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,0000, dan nilait-Statistik sebesar 14.54922 dengan koefisien bertanda positif. Karena nilai probabilitas yang diperoleh <0,05 dan nilai koefisien bertanda positif, maka variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017.
2) Nilai Prob variabel nilai investasi terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017 adalah sebesar 0.0066 dan nilait-Statistik sebesar-1.619237 dengan koefisien bertanda negatif. Karena nilai probabilitas yang diperoleh <0,05 dan nilai koefisien bertanda negatif, maka variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017.
3) Nilai Prob variabel pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017 adalah sebesar 0.0112 dan nilai t-statistik sebesar 1.593844 dengan koefisien bertanda positif. Karena nilai probabilitas yang diperoleh < 0,05 , maka variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017.

b. Uji Simultan atau Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.Dengan taraf signifikan 0,05 maka jika nilai probabilitas hasil uji F >0,05 variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat dan jika nilai probabilitas hasil uji F <0,05 variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 4.9

Hasil Uji Simultan

Root MSE	0.030939	R-squared	0.447612
Mean dependent var	0.325602	Adjusted R-squared	0.441287
S.D. dependent var	0.041707	S.E. of regression	0.031175
Akaike info criterion	-4.083507	Sum squared resid	0.254625
Schwarz criterion	-4.029620	Log likelihood	547.1064
Hannan-Quinn criter.	-4.061858	F-statistic	70.76824
Durbin-Watson stat	1.406394	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Hasil olahan Eviews (2020)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas hasil uji F yang diperoleh adalah sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas <0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel IPM, investasi, dan laju pertumbuhan secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisis Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besar kontribusi yang diberikanvariabel bebas terhadap variabel terikat. Dari (uji F) menunjukkan bahwa nilai *R-Squared* adalah sebesar 0,441612 dan nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,441287. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan variabel IPM, nilai investasi, dan laju pertumbuhan terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017 adalah sebesar 44,12%, sedangkan sisanya sebanyak 55.88% variansi ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017 dipengaruhi oleh faktor lain selain IPM, nilai investasi, dan laju pertumbuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Variabel Bebas Secara Simultan Terhadap Variabel Terikat

Dari hasil pengujian, penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (X1), Investasi (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Ketimpangan Pendapatan (Y). Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pengujian nilai F hitung sebesar 2,635 dengan probabilitas variabel indeks pembangunan manusia (X1), Investasi (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) sebesar 0,000 sehingga lebih kecil dari pada nilai signifikasi sebesar 0,05 (5%) sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa secara simultan semua variabel independen diantaranya indeks pembangunan manusia (X1), Investasi (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Ketimpangan Pendapatan (Y).

Pada hakikatnya pemerataan pendapatan adalah suatu kondisi dimana seluruh masyarakat yang tinggal disuatu wilayah dapat merasakan kesejahteraan untuk hidupnya. Menurut Simon Fuglsang, distribusi pendapatan dipengaruhi oleh banyak aspek antara lain aspek ekonomi ataupun non ekonomi. Aspek ekonomi diantaranya keadaan makro ekonomi daerah, sedangkan aspek non ekonomi semacam keadaan demografi, kondisi alam, politik maupun budaya dari daerah tersebut. Penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nur Afini,yang menyatakan bahwa variabel PDRB Perkapita dan IPM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemerataan pendapatan di Jawa Timur.

B. Pengaruh Variabel Bebas Secara Parsial Terhadap Variabel Terikat

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah-Daerah Provinsi Jawa Timur 2011-2017

Hasil dari analisis data pada bab sebelumnya, variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1) menunjukkan bahwa variabel (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Hasil ini dapat terlihat dari hasil koefisien regresinya yang dihasilkan sebesar 0,000l lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien bertanda positif. Pengaruh positif berarti bahwa jika Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur bertambah, maka akan membuat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur naik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh yosi eka dkk yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia". Menurut penelitian tersebut, secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menandakan bahwa jika IPM mengalami kenaikan, maka distribusi pendapatan mengalami kenaikan. Demikian sebaliknya jika IPM mengalami penurunan, maka distribusi pendapatan menurun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dapat juga dijelaskan bahwa salah satu instrument dari IPM yakni tingkat harapan hidup yang merupakan faktor kunci dalam penciptaan tenaga kerja yang produktif, tingkat harapan hidup di Provinsi Jawa Timur tergolong cukup tinggi sehingga dapat membentuk dan menciptakan tenaga kerja yang produktif dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Namun sayangnya, hal tersebut hanya mengelompok pada daerah-daerah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi saja sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Penjelasan diatas dapat dijelaskan dengan teori Perroux yang mengatakan bahwa pemerataan pendapatan tidak dapat terjadi pada semua wilayah secara bersamaan, sebab masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini adalah sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang berbeda juga tiap daerah. Pada daerah yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan, serta sebagai pusat kegiatan perekonomian maka akan terjadi ketimpangan pendapatan antara wilayah yang merupakan pusat pertumbuhan dengan wilayah yang bukan merupakan pusat pertumbuhan.[49]

Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur bisa dibilang cukup cepat, sehingga menjadikan kompetisi dalam

[49] Nur Afini, *"Pengaruh PDRB Perkapita Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pemerataan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017"*, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Akibatnya, banyak penduduk yang tidak mampu terserap oleh pasar tenaga kerja sehingga angka pengangguran akan semakin tinggi. Jika pertumbuhan penduduk di Jawa Timur tidak diimbangi dengan IPM yang baik maka secara tidak langsung akan memperparah keadaan yakni semakin melebarnya ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

Jika melihat data IPM yang di publikasi oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2011-2017 terlihat bahwa IPM belum merata di seluruh daerah. IPM cenderung tinggi hanya di wilayah perkotaan (angkanya sekitar 70-80). Sedangkan untuk di daerah yang cenderung jauh dari pusat perkotaan maupun pusat perekonomian, cenderung lebih rendah (angkanya sekitar 60-70).

Namun jika dilihat secara keseluruhan, selama periode tahun 2011-2017 bahwa ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tergolong dalam ketimpangan relatif rendah sampai sedang yaitu dari angka 0,2 sampai dengan 0,4. Adapun grafik yang menunjukkan IPM Jawa Timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan, berikut grafik indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

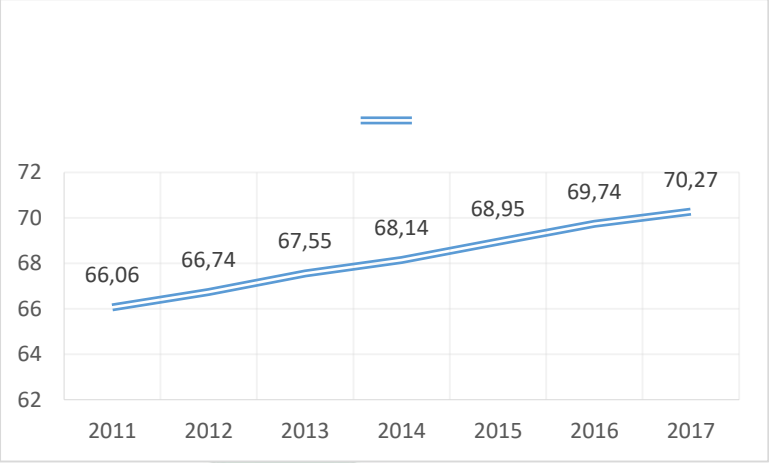

Gambar 5.1 Grafik IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2017

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata kenaikan pertumbuhan manusia kurang lebih sekitar 1% pertahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan perbaikan terhadap kualitas pembangunan manusia di Jawa Timur.

Kenaikan tertinggi pada tahun 2017 hanya terjadi di pusat kota seperti kota surabaya, kota malang, kota madiun. Sedangkan, IPM terendah terjadi di Kab. Sampang.[50] Rendahnya IPM di Kabupaten Sampang disebabkan salah satu faktor yaitu rata-rata lama belajar masyarakat Sampang yang masih rendah. Untuk partisipasi sekolah di tingkat SD sebesar 33,73% kemudian untuk tingkat SMP sebesar 14,546% sedangkan untuk tingkat SMA sebesar 19,84%.[51]

[50]http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pada-2017-indeks-pembangunan-manusia-jatim-tumbuh-0-76-persen Diakses pada tanggal 27 oktober 2020 pada pukul 13.45 WIB
[51] BPS, *Statistik Tingkat Kesejahteraan Sampang 2018*, diakses pada 16 Oktober 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bauhet (perwakilan UNDP Indonesia) dalam salah satu situs berita daring mengatakan bahwa infrastruktur pendukung untuk meningkatkan IPM belum merata dirasakan oleh semua masyarakat. Contohnya seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan dimana kota besar lebih baik dibandingkan dengan di daerah. Kondisi ini menyebabkan IPM tidak merata sehingga kualitas SDM dengan IPM yang tinggi (di kota) lebih baik dibandingkan dengan kualitas SDM yang memiliki IPM lebih rendah (di daerah). Kondisi seperti akan turut mendorong pembangunan yang tidak merata dan jika kondisi seperti ini terus-menerus maka ketimpangan pendapatan juga akan semakin melebar antar daerah.

2. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah-Daerah Provinsi Jawa Timur 2011-2017

Hasil dari hasil analisis data pada bab sebelumnya, variabel investasi (X2) menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel Y. Hasil ini dapat dilihat dari hasil koefisien regresinya sebesar -0.000546 dengan nilai probabilitas nya 0,0066 yang berarti < 0,05 dan nilai koefisien bertanda negatif. Pengaruh negatif berarti bahwa jika investasi di Jawa Timur bertambah, maka akan membuat ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di Jawa Timur menurun.

Setiap kenaikan investasi akan diikuti penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan teori Harrod-Domar yang menerangkan bahwa naiknya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita naik karena adanya kegiatan-kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produktif. Dengan adanya investasi, maka akan menyerap banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proses produksi, sehingga akan mengurangi pengangguran dan kemudian akan membuat pemerataan pendapatan serta akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan persebaran dan kenaikan investasi yang kemudian berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maqin (2011) bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.[52]

Berikut grafik investasi di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2011-2017 :

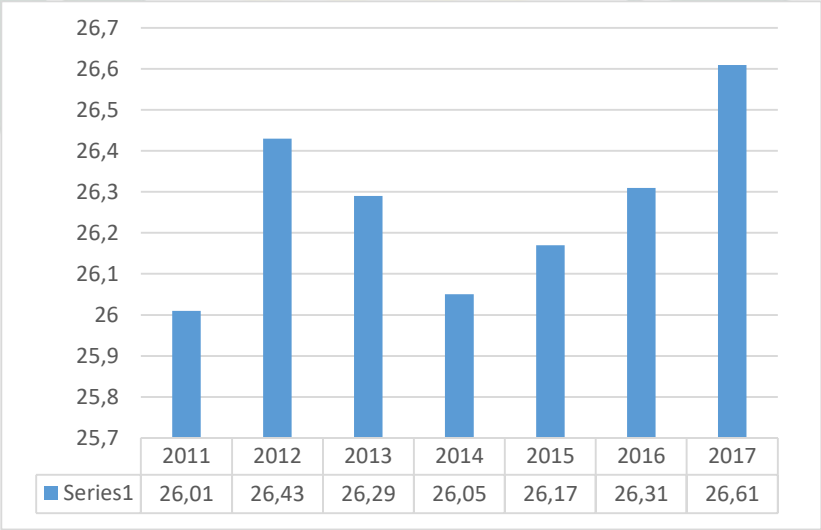

Gambar 5.2 Grafik Investasi di Jawa Timur 2011-2017

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur

[52] Nita Tri Hartini, Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015, Dalam Skripsi Univesitas Negeri Yogyakarta, hal. 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa iklim investasi di Jawa Timur mengalami fluktuasi antara tahun 2011-2013, namun di tahun 2014-2017, investasi di Provinsi Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Investasi Jawa Timur pada awal tahun 2012 terlihat masih mengalami peningkatan terutama pada sektor industri pengolahan seperti pembangunan pabrik semen di Tuban, pembanguanan pabrik plastik daur ulang di Malang, pabrik produksi gula, etanol, listrik serta pembangunan infrastruktur di area pelabuhan yang bertujuan untuk mempermudah akses. Iklim investasi di Jawa Timur yang masih terjaga membuat kinerja investasi mengalami peningkatan.[53]

Sedangkan investasi di Jawa Timur pada tahun 2017 mengalami peningkatan tertinggi sejak tahun 2011. Hal ini terlihat pada banyaknya pembangunan yang dilakukan di Jawa Timur seperti pembangunan kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang bertujuan untuk menpercepat proses realisasi investasi yang masuk, pembangunan tol Krian-Mojokerto dengan harapan aktivitas ekonomi di Jawa Timur tidak berpusat di Surabaya saja, dengan harapan terjadi pemerataan ekonomi di daerah-daerah lain.[54]

Dengan adanya investasi yang masuk di Jawa Timur seperti pembanguan pabrik-pabrik baru yang automatis membutuhkan banyak tenaga kerja baru yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu

[53]https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jatim/Pages/ker_jatim_tw412.aspx Diakses pada tanggal 27 oktober 2020 pada pukul 12.23 WIB
[54]https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jatim/Pages/Kajian-Ekonomi-Keuangan-Regional-Jawa-Timur-Tw-I-2016.aspxDiakses pada tanggal 27 oktober 2020 pada pukul 13.13 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan tol juga bertujuan untuk pemerataan ekonomi supaya tidak berpusat di kota saja, namun dapat tersebar di daerah-daerah lain sehingga menekan angka ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Timur.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah-Daerah Provinsi Jawa Timur 2011-2017

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang pertumbuhan ekonomi nya cukup besar di Indonesia. Dengan kondisi geografis dan demografisnya, Provinsi Jawa Timur menjadi sentral ekonomi nasional. Pasalnya, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diatas 5% yang artinya melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun sektor yang paling berpengaruh yaitu sektor industry pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor, dan yang selanjutnya yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Namun sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jawa Timur tersebut tidak diimbangi dengan pemerataan distribusi pendapatan di tiap-tiap daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis data pada bab sebelumnya, yakni variabel X3 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Hasil ini dapat terlihat dari hasil koefisien regresinya yang dihasilkan Nilai Prob variabel pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017 adalah sebesar 0.0112 dan nilai t-statistik sebesar 1.593844 dengan koefisien bertanda positif. Karena nilai probabilitas yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh < 0,05 , maka variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017. Hal ini menandakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka ketimpangan pendapatan antar daerah akan naik juga. Demikian sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, maka ketimpangan pendapatan antar daerah akan turut ikut juga.

Adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan yang mempunyai korelasi yang sangat kuat ini dijelaskan oleh teori Kuznet, dimana hal tersebut disebabkan karena pada awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah penduduk miskin berangsur-angsur berkurang. Sehingga semakin tinggi PDRB mengindikasikan bahwa penduduk dalam suatu daerah semakin sejahtera, namun kesejahteraan tiap individu berbeda-beda.[55]

Ada keterkaitan antara PDRB per kapita yang dihasilkan dengan tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Artinya, apa yang dihasilkan dari pembangunan perekonomian kabupaten/kota, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, yang menyebabkan pemerataan distribusi pendapatan sekaligus menurunkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 tidak menjadi akibat langsung dari pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Sebagai indikator ketimpangan yang

[55] RPJMD Jawa Timur, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020, https://jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/BAB-IV-RPJMD-2014-2019.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi di Jawa Timur merupakan dampak dari tingginya pendapatan di daerah perkotaan seperti Surabaya, Gresik, Kediri dan sekitarnya.

Penelitian merujuk pada penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Fafan (2015) yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antara Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2012" hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan dari pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukan tingkat kesejahteraan yang tinggi hal ini sesuai dengan teori Neo Marxist menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Sedangkan di daerah-daerah lain pendapatannya tergolong relatif rendah.[56] Melihat data PDRB pada bab sebelumnya terlihat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya terjadi pada di daerah-daerah tertentu yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi seperti kawasan industri dan pariwisata. Kondisi seperti ini jika terjadi terus menerus akan membuat ketimpangan pendapatan semakin melebar karena tidak ada pemerataan aktivitas ekonomi di daerah-daerah yang relatif rendah.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi wilayah, suatu model yang dipelopori oleh Gurnal Mirdal dinamakan Model Kota dan Desa (center-pheriphery Model) yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kegiatan perekonomian yang

[56]Muhammad Arif, Rossy Agustin, *Ketimpangan Pendapatan Provinsi JawaTimur Dan Faktor Yang Mempengaruhinya*, URECOL UniversitasMuhammadiyahMagelang, 2017, hal. 327

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di daerah pedesaan (*ruall*) dengan kegiatan ekonomi yang ada di daerah perkotaan *(urban).*[57] Selain itu, kerikatan antara daerah pedesaan dan perkotaan akan mendorong terwujudnya *Trickle Down Effect* atau efek Rembesan.[58] Melalui proses ini maka akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dilanjutkan dengan pemerataan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan akan dapat diperbaiki. Sehingga pada akhirnya kemakmuran masyarakat secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan.

[57] Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, (Raja Grafindo Persada, Padang, 2012), hlm. 105
[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah-Daerah di Timur tahun 2011-2017, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara simultan, variabel Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signfikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah-Daerah di Jawa Timur tahun 2011-2017. Hal ini menunjukkan bahwa jika Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi meningkat maka diikuti dengan peningkatan ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Jawa Timur tahun 2011-2017.
2. Secara parsial, variabel Indeks Pembangunan Manusia, dan pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signfikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Jawa Timur tahun 2011-2017. Hal ini berarti bahwa jika IPM dan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka ketimpangan pendapatan juga akan naik. Sedangkan variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah-daerah di Jawa Timur. Hal ini berarti bahwa jika investasi mengalami kenaikan, maka ketimpangan pendapatan akan turun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya jika melakukan penelitian yang memiliki tema yang sama diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang telah dilakukan.

2. Walaupun tingkat harapan hidup di provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan, komponen-komponen lain juga perlu dicermati oleh pemerintahan daerah. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain indeks kesehatan, indeks pendidikan,dan indeks daya beli, untuk itu butuh adanya kebijakan maupun program yang menunjang kenaikan Indeks Pembangunan Manusia. Tidak hanya upaya peningkatan pendampingan dan evaluasi program perlu ditinjau ulang agar program pemerintah tepat pada sasara. Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebaiknya di fokuskan pada kabupaten-kabupaten yang masi tertinggal atau yang belum berkembang untuk mengurangi ketimpangan ditribusi pendapatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afini, Nur. 2019. *Pengaruh PDRB Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pemerataan Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya

Alhudori. 2017. *Pemgaruh IPM dam Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi. Jurnal of Economics and Business*, Vol. 1, No. 1

Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat*. Yogyakarta : STIE YKPN

Badan Pusat Statistik. 2017.diakses melalui website www.bps.go.id

Badan Pembangunan dan Perekonomian Provinsi Jawa Timur dalam website http://bappeda.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam website http://jatimprov.go.id

Baru Press, 2015

Biro Adm. Perekonomian Jatim – data dinamis perekonomian Jawa Timur desember 2017 dalam website https://ro-ekonomi.jatimprov.go.id

Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana

Denni Sulistio Mirza. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009*. EDAJ, Vol. 1, No.1

Dewan Perwakilan Rakyat dalam website www.dpr.go.id

Fitriyah, Lailatul dan Rachmawati, Lucky. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Gerbang Kertosusilo Provinsi Jawa Timur*. Dalam Jurnal UNESA

Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar Edisi VI*. Jakarta: Erlangga

Gujarati, Damodar N. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 2*. Jakarta : Erlangga

Hartini, Nita Tri. *Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015*. Dalam Skripsi Univesitas Negeri Yogyakarta

Hidayat, Muhammad Haris. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan IPM TerhadKap etimpangan Pendapatan Antar Daerah Di*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012. Dalam Skripsi – Universitas Diponegoro

Misbahuddin dan Hasan, Iqbal. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta. Bumi Aksara

Putra, Komang Agus Triasta dan Aswitari, Luh Putu. 2013. *Kebutuhan Investasi Sektor Basis Industri Per Kecamatan di Kabupaten Gianyar dalam Rangka One Village One Product*. Dalam *E-Journal*: EP Unud, Vol. 2, No.12

Pradnyadewi, Diah dan Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. 2017. *Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali*. Dalam *E-Journal* Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 6, No. 2

Rustariyuni, Surya Dewi. *Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004-2012*. Dalam Jurnal Piramida, Vol. 10, No.1

Setiawan, Mohammad Bhakti dan Abdul Hakim. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia*, Dalam Jurnal Economica, Vol. 9, No. 1

Silalahi, Sahat Aditya Fandhitya, dkk. 2018. *Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Simbolon, Hotman. 2009. Statistika. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sjahrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Padang : Rajawali Pers

Subanti, Sri dan Hakim, Arif Rahman . 2014. *Ekonometri*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Sugiono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sukirno, Sadono. 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Suryana. 2000. *Ekonomika Pembanguna.* Jakarta: Salemba Empat

Sutopo, Eng Yeri dan Slamet, Achmad. 2017. *Statistika Inferensial*. Semarang : Penerbit ANDI

Todaro, Michael dan Smith, Stephen. 2011. *Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Erlangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan keempat). 1994. Jakarta : Balai Pustaka

Wiratna, Sujarweni, V.. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Wulandari, Istiqomah Sapti. *Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Magelang Tahun 2004-2013*. Dalam Jurnal Universitas Tidar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id